



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG INSPEKTORAT

Jl. DIPONEGORO NOMOR 1 TELP. 200816 SERANG

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Dokumen Rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Serang untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Pedoman reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Serang, 28 Maret 2024

INSPEKTUR KABUPATEN SERANG


Drs. RUDY SUHARTANTO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19670612 198603 1 003



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) TAHUN 2023

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN ANGGARAN 2024

4.2.1	Jenis Pelayanan Dasar	182
4.2.2	Target Pencapaian SPM	182
4.2.3	Realisasi.....	183
4.2.4	Alokasi Anggaran.....	183
4.2.5	Dukungan Personil	184
4.2.6	Permasalahan dan Solusi	184
4.3	Urusan Pekerjaan Umum	184
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar	184
4.3.2	Target Pencapaian SPM Tahun 2023	184
4.3.3	Realisasi.....	184
4.3.4	Alokasi Anggaran.....	185
4.3.5	Dukungan Personil	185
4.3.6	Permasalahan dan Solusi	185
4.4	Urusan Perumahan Rakyat	185
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar	185
4.4.2	Target Pencapaian SPM Tahun 2023	186
4.4.3	Realisasi.....	186
4.4.4	Alokasi Anggaran.....	186
4.4.5	Dukungan Personil	186
4.4.6	Permasalahan dan Solusi	187
4.5	Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	187
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar Pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	187
4.5.2	Target Pencapaian SPM Tahun 2023	187
4.5.3	Realisasi.....	187
4.5.4	Alokasi Anggaran.....	188
4.5.5	Dukungan Personil	188
4.5.6	Permasalahan dan Solusi	188
4.6	Urusan Sosial	189
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar	189
4.6.2	Target Pencapaian SPM Tahun 2023	189
4.6.3	Realisasi.....	189
4.6.4	Alokasi Anggaran.....	190
4.6.5	Dukungan Personil	190
4.6.6	Permasalahan dan Solusi	191
BAB V PENUTUP.....		195
LAMPIRAN - LAMPIRAN		196

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Kecamatan dan Luas Wilayahnya di Kabupaten Serang	2
Tabel 2 Pulau-Pulau Di Kabupaten Serang	3
Tabel 3 Jumlah Kecamatan, Desa/ Kelurahan dan Penduduk	6
Tabel 4 Jumlah perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah.....	14
Tabel 5 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	19
Tabel 6 kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen.....	30
Tabel 7 Capaian Kinerja Makro	73
Tabel 8 Evaluasi Kinerja Misi 1 Sasaran 1	146
Tabel 9 Evaluasi Kinerja Misi 1 Sasaran 2	147
Tabel 10 Evaluasi Kinerja Misi 2 Sasaran 1	148
Tabel 11 Evaluasi Kinerja Misi 3 Sasaran 1	153
Tabel 12 Evaluasi Kinerja Misi 3 Sasaran 2	155
Tabel 13 Evaluasi Kinerja Misi 4 Sasaran 1	157
Tabel 14 Evaluasi Kinerja Misi 4 Sasaran 2	158
Tabel 15 Evaluasi Kinerja Misi 4 Sasaran 3	160
Tabel 16 Evaluasi Kinerja Misi 4 Sasaran 4	161
Tabel 17 Evaluasi Kinerja Misi 4 Sasaran 5	162
Tabel 18 Evaluasi Kinerja Misi 4 Sasaran 6	164
Tabel 19 Evaluasi Kinerja Misi 4 Sasaran 7	165
Tabel 20 Evaluasi Kinerja Misi 4 Sasaran 8	165
Tabel 21 Evaluasi Kinerja Misi 5 Sasaran 1	167
Tabel 22 Evaluasi Kinerja Misi 5 Sasaran 2	169
Tabel 23 Evaluasi Kinerja Misi 5 Sasaran 3	170
Tabel 24 Evaluasi Kinerja Misi 5 Sasaran 4	171
Tabel 25 Evaluasi Kinerja Misi 5 Sasaran 5	173
Tabel 26 Evaluasi Kinerja Misi 5 Sasaran 6	174
Tabel 27 Evaluasi Kinerja Misi 5 Sasaran 6	175
Tabel 28 Evaluasi Kinerja Misi 6 Sasaran 1	177

KATA PENGANTAR



Hj. RATU TATU CHASANAH, SE, M.Ak.
BUPATI SERANG

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan Syukur senantiasa kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, karunia serta PerkenanNya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Serang Tahun 2023 dapat diselesaikan.

LPPD merupakan salah satu laporan yang wajib yang disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan LPPD Tahun 2023 ini berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif.

Kami berterima kasih kepada seluruh pemangku urusan yang telah melaksanakan tugasnya dan melaporkan capaian kinerjanya untuk dikompilasi dalam LPPD ini. Serta seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian laporan ini.

Kami menyadari bahwa penyusunan LPPD ini masih banyak kekurangan yang harus dibenahi dan ditingkatkan pada tahun yang akan datang. Kami akan memberikan kinerja terbaik bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Serang. Seraya berharap, semoga segala upaya kita dalam membangun Kabupaten Serang, senantiasa memperoleh Petunjuk serta Ridho Allah Subhanahu Wata'ala. Aamiin Ya Robbal 'alamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Hj. RATU TATU CHASANAH, SE, M.Ak.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang Undang Pembentukan Daerah

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.

b. Data geografis wilayah

Kabupaten Serang berada di ujung barat Pulau Jawa terletak pada koordinat $5^{\circ} 50'$ - $6^{\circ} 21'$ Lintang Selatan dan $105^{\circ} 0'$ - $106^{\circ} 22'$ Bujur Timur. Kabupaten Serang adalah daerah yang sangat potensial karena dilalui jalan tol Jakarta - Merak menuju pulau Sumatera melalui pelabuhan penyeberangan Merak dengan 5 akses pintu keluar dan masuk sebagai transit perhubungan darat antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dan daerah penyangga Ibu Kota Negara.

Batas Administrasi Daerah

Secara administratif, Kabupaten Serang terdiri atas 29 Kecamatan dan 326 Desa, dengan batas – batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa dan Kota Serang;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lebak dan Pandeglang.

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tangerang;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Cilegon dan Selat Sunda;

Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Serang berdasarkan Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 seluas **1.469,908 Km²** serta di bawah ini tabel tentang nama-nama kecamatan di wilayah Kabupaten Serang berikut luas wilayah dan jumlah desanya berdasarkan Surat BIG Nomor B-10.8/PBW-BIG/IGD.04.05/11/2022.

Tabel 1 Daftar Kecamatan dan Luas Wilayahnya di Kabupaten Serang

NO	KECAMATAN	IBU KOTA	LUAS	
			KM ²	%
1.	Anyar	Anyar	67,90	0,05
2.	Bandung	Bandung	25,79	0,02
3.	Baros	Baros	36,07	0,02
4.	Binuang	Binuang	28,72	0,02
5.	Bojonegara	Bojonegara	36,97	0,03
6.	Carenang	Panenjoan	29,07	0,02
7.	Cikande	Cikande	49,05	0,03
8.	Cikeusal	Cikeusal	56,29	0,04
9.	Cinangka	Cinangka	123,09	0,08
10.	Ciomas	Sukadana	56,61	0,04
11.	Ciruas	Citerep	33,62	0,02
12.	Gunungsari	Gunungsari	53,44	0,04
13.	Jawilan	Majasari	44,95	0,03
14.	Kibin	Ciagel	30,58	0,02
15.	Kragilan	Kragilan	38,05	0,03
16.	Kramatwatu	Kramatwatu	56,56	0,04
17.	Kopo	Kopo	36,51	0,02
18.	Lebak Wangi	Lebak Wangi	34,74	0,02
19.	Mancak	Labuan	97,94	0,07
20.	Pabuaran	Pasanggrahan	40,08	0,03
21.	Padarincang	Padarincang	97,64	0,07
22.	Pamarayan	Pamarayan	45,02	0,03
23.	Petir	Mekar Baru	49,22	0,03
24.	Pontang	Pontang	60,39	0,04
25.	Pulo Ampel	Sumuranja	45,99	0,03
26.	Tanara	Cerucuk	47,21	0,03
27.	Tirtayasa	Tirtayasa	59,70	0,04
28.	Tunjung Teja	Tunjung Teja	42,40	0,03
29.	Waringinkurung	Waringinkurung	46,33	0,03
KABUPATEN SERANG			1.469,908	100

Di Kabupaten Serang terdapat pulau-pulau yang berada di wilayah perairan dan tercatat sebanyak 17 pulau diantaranya adalah tersebut pada tabel berikut ini:

Tabel 2 Pulau-Pulau Di Kabupaten Serang

No.	Nama Pulau	Letak Geografis	Topografi	Kondisi Lahan	Aksesabilitas	Luas (ha)
1	Pulau Sangiang (Sanghyang)	106050'00" - 105051'51" -6 BT dan 05059'00"LS Desa Cikoneng Kecamatan Anyar	Bergunung, berbatuan vulkanik, pantai berpasir, 0-100 m dpl.	Kebun kelapa dan semak 450 ha, mangrove 200 ha, perumahan dan fasum 40 ha, dan sisanya hamparan pasir.	Kapal dari pelabuhan Anyar ± 1,5 jam, 11 km dari kecamatan dan 43 km dari Ibukota Propinsi	845,5
2	Pulau Salira	1060 03' 41" - 106o 03' 37" BT dan 050 53' 14" - 050 53' 17" LS Desa Salira Kecamatan Pulo Ampel	Relatif datar 0-2 m dpl	Berawa	Kapal dari pelabuhan ikan Karangantu ± 2 jam, 12 km dari Kecamatan dan 34 km dari Ibukota Kabupaten	1,875
3	Pulau Kalih Utara	1060 05' 21" - 1060 05' 51" BT dan 050 53' 51" - 050 53' 58" LS Desa Puloampel Kecamatan Puloampel	Relatif datar 0-3 m dpl	Berawa	Kapal dari pelabuhan ikan Karangantu ± 2 jam	Pulau Kali Utara 3 Ha
4	Pulau Kalih Selatan					Pulau Kali Selatan 3,5 Ha
5	Pulau Tarahan	1060 06' 47" - 1060 07' 00" BT dan 050 56' 48" - 050 57' 05" LS Desa Marga Giri Kecamatan Bojonegara	Datar 0-5 m dpl, Berbukit rendah, berbatuan vulkanik	Berawa	Kapal dari pelabuhan ikan Grenyang/Teratai ± 0,5 jam dari pelabuhan ikan Karangantu ± 1,5 jam dan 4,25 km dari Kecamatan 26 km dari kantor Kabupaten/ Ibukota Propinsi	11,875
6	Pulau Kemanisan	1060 06' 16" - 1060 06' 29" BT dan 050 58' 01" - 050 58' 12" LS Desa Bojonegara Kecamatan Bojonegara	Datar 0-5 m dpl, Berbukit rendah, berbatuan vulkanik	Berawa	Kapal dari pelabuhan Ikan Grenyang/Teratai ± 0,5 jam dan dari Pelabuhan ikan Karangantu ± 1,5 jam dan 1,5 km dari kecamatan dan 23,5 km dari kantor	7,5

No.	Nama Pulau	Letak Geografis	Topografi	Kondisi Lahan	Aksesabilitas	Luas (ha)
					Kabupaten/ Ibukota Propinsi	
7	Pulau Cikantung	1060 06' 22" - 1060 06' 30" BT dan 050 57' 47" - 050 57' 50" LS Desa Bojonegara Kecamatan Bojonegara	Datar 0-5 m dpl, Berbukit rendah, berbatuan vulkanik	Berawa	Kapal dari pelabuhan ikan Grenyang/Teratai 20 menit dan dari pelabuhan ikan Karangantu ±1,15 jam dan 24,5 km dari kantor Kabupaten/Ibukota Propinsi	1,25
8	Pulau Panjang	1060 08' 18" - 1060 10' 10" BT dan 050 55' 08" - 050 56' 41" LS Desa Pulau Panjang Kecamatan Pulo Ampel	Relatif datar 0-4 m dpl	Kebun kelapa & semak belukar 400 ha, hutan mangrove 100 ha, perumahan dan fasum 100 ha, rawa-rawa dan pertambakan 135 ha	Dari Bojonegara 30 menit, 16 km dari Kecamatan, 22 km dari Ibukota Propinsi	502
9	Pulau Semut	1060 10' 13" - 1060 10' 17" BT dan 050 56' 18" - 050 55' 22" LS Desa Pulau Panjang Kecamatan Pulo Ampel	Datar 0-0,5 m dpl	Daerah Rawa-rawa mangrove	Kapal dari pelabuhan ikan Karangantu ±1,5 jam dan 14,5 km dari Kecamatan, 20,5 km dari kantor Kabupaten/Ibukota Propinsi	1,875
10	Pulau Kubur	1060 8' 50" - 1060 8' 59" BT dan 050 58' 55" - 050 59' 01" LS Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel	Relatif datar 0-2 m dpl	Daerah rawa-rawa mangrove	Kapal dari pelabuhan ikan Karangantu ± 50 menit dan jarak dari kecamatan 8,8 km, dari Kantor Kabupaten/Ibukota Propinsi 13,8 km, Ibukota negara 104,8 km	1,563
11	Pulau Lima	1060 09' 12" - 1060 09' 21" BT dan 060 10' 00" - 060 00' 00" LS Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel	Relatif datar 0-4 m dpl	Rawa-rawa ± 900 m ² , perkebunan kelapa 1000 m ² semak belukar ± 8000 m ² , dan sisanya lahan mangrove	Kapal dari pelabuhan ikan Karangantu ± 0.5 jam dan jarak dari Kecamatan 9 km, dari Kantor Kabupaten/Ibukota Propinsi	3,5

No.	Nama Pulau	Letak Geografis	Topografi	Kondisi Lahan	Aksesabilitas	Luas (ha)
					Ibukota Propinsi 15 km	
12	Pulau Pisang	1060 08' 45" - 1060 08' 56" BT dan 050 59' 45" - 050 59' 55" LS Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel	Agak bergelombang, Berbukit rendah, berbatuan vulkanik, 0- 10 m dpl, warna tanah kecoklatan	Daratan bergelombang, semak belukar	Kapal dari pelabuhan ikan Karangantu ± 0,5 jam dan jarak dari Kecamatan 10 km, dari kantor Kabupaten/ Ibukota Propinsi 16 km	2,5
13	Pulau Karang Cawene	1050 51' 06" - 1050 51' 09" BT dan 060 08' 14" - 060 08' 16" LS Desa Cinangka Kecamatan Cinangka	Pulau Karang Terjal	Tidak memiliki vegetasi dan tidak berpenduduk	Kapal dari pelabuhan Anyar	4,38
14	Pulau Pamojan Besar	1060 13' 10" - 1060 12' 42" BT dan 050 56' 40 - 050 56' 28" LS Desa Susukan Kec. Tirtayasa	Agak berbukit, Berbukit rendah, berbatuan vulkanik, 0-15 dpl tergolong lahan agak bergelombang	Berawa, 20 % perkebunan kelapa dan semak belukar	1 jam dari Pelabuhan Karangantu, 17,5 km dari Kecamatan, 37,5 km dari kantor Kabupaten dan Ibukota Propinsi	15
15	Pulau Pamojan Kecil	1060 10' 15" - 1060 10' 17" BT dan 050 57' 47" - 050 57' 56" LS Desa Domas Kec. Pontang	Datar 0-4 m dpl	Berawa	1 jam 15 menit dari Pelabuhan Karangantu. 18 km dari Kecamatan. 38 km dari kantor Kabupaten dan Ibukota Provinsi.	0,63
16	Pulau Tunda	1060 50' 00" - 1050 51' 51" BT dan 050 56' 15" - 050 59' 00" LS Desa Warga-sara Kecamatan Tirtayasa	Relatif datar 0-5 m dpl	Perkebunan kelapa dan semak belukar (170 ha), mangrove (30ha), pemukiman dan fasum (27ha)	3 jam dari Pelabuhan Karangantu, 22,5 km dari Kecamatan, 42,5 km dari kantor Kabupaten dan Ibukota Propinsi.	257,5
17	Pulau Karang Parejakah	1050 51' 06" - 1050 51' 09" BT dan 060 08' 16" - 060 08' 17" LS Desa Cinangka Kecamatan Cinangka	Pulau Karang Terjal	Tidak memiliki vegetasi dan tidak berpenduduk	Kapal dari pelabuhan Anyar	3,50

Sumber: Perda No.2 Tahun 2013

c. Jumlah Penduduk Di Kabupaten Serang

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersal dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, jumlah penduduk di Kabupaten Serang tahun 2023 per Semester II adalah sebanyak **1.711.653 orang**.

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan

Tabel 3 Jumlah Kecamatan, Desa/ Kelurahan dan Penduduk

No.	Kecamatan	No.	Desa	Jumlah Penduduk
1	KRAMATWATU	1	Kramatwatu	102.144
		2	Margasana	
		3	Pejaten	
		4	Toyomerto	
		5	Harjatani	
		6	Serdang	
		7	Terate	
		8	Tonjong	
		9	Pamengkang	
		10	Pegadingan	
		11	Lebakwana	
		12	Wanayasa	
		13	Pelamunan	
		14	Teluk Terate	
		15	Margatani	
2	WARINGINKURUNG	16	Waringinkurung	50.631
		17	Talaga Luhur	
		18	Binangun	
		19	Melati	
		20	Sasahan	
		21	Sukadalem	
		22	Sukabares	
		23	Sambilawang	
		24	Sampir	
		25	Cokopsulanjana	
		26	Kemuning	
3	BOJONEGARA	27	Bojonegara	51.213
		28	Mangkunegara	
		29	Wanakarta	
		30	Karang Kepuh	
		31	Lambang Sari	

No.	Kecamatan	No.	Desa	Jumlah Penduduk
		32	Kertasana	
		33	Margagiri	
		34	Ukirsari	
		35	Pakuncen	
		36	Pangarengan	
		37	Mekar Jaya	
4	PULO AMPEL	38	Pulo Ampel	40.654
		39	Sumuranja	
		40	Mangunreja	
		41	Kedungsoka	
		42	Salira	
		43	Argawana	
		44	Banyuwangi	
		45	Margasari	
		46	Pulo Panjang	
5	CIRUAS	47	Ciruas	85.690
		48	Citerep	
		49	Pulo	
		50	Kadikaran	
		51	Kepandean	
		52	Gosara	
		53	Bumijaya	
		54	Penggalang	
		55	Pamong	
		56	Cigelam	
		57	Singamerta	
		58	Ranjeng	
		59	Beberan	
		60	Kaserangan	
61	Pelawad			
6	KRAGILAN	62	Kragilan	83.273
		63	Silebu	
		64	Pematang	
		65	Dukuh	
		66	Undar Andir	
		67	Sukajadi	
		68	Sentul	
		69	Jeruk Tapis	
		70	Kendayakan	
		71	Tegalmaja	

No.	Kecamatan	No.	Desa	Jumlah Penduduk
		72	Cisait	
		73	Kramatjati	
7	PONTANG	74	Pontang	48.845
		75	Sukanegara	
		76	Linduk	
		77	Pulokencana	
		78	Kelapian	
		79	Kubang Puji	
		80	Domas	
		81	Singarajan	
		82	Kaserangan	
		83	Wanayasa	
		84	Sukajaya	
8	TIRTAYASA	85	Tirtayasa	49.623
		86	Samparwadi	
		87	Kemanisan	
		88	Pontanglegon	
		89	Kebon	
		90	Sujung	
		91	Lontar	
		92	Susukan	
		93	Wargasara	
		94	Laban	
		95	Tengkurak	
		96	Alang-Alang	
		97	Kebuyutan	
		98	Puser	
9	TANARA	99	Tanara	44.501
		100	Cerukcuk	
		101	Tenjoayu	
		102	Sukamanah	
		103	Lempuyang	
		104	Siremen	
		105	Bendung	
		106	Pedaleman	
		107	Cibodas	
10	CIKANDE	108	Cikande	114.503
		109	Leuwi Limus	
		110	Nambo Udik	
		111	Parigi	

No.	Kecamatan	No.	Desa	Jumlah Penduduk
		112	Koper	
		113	Bakung	
		114	Julang	
		115	Sukatani	
		116	Situterate	
		117	Kamurang	
		118	Gembor Udik	
		119	Songgom Jaya	
		120	Cikande Permai	
11	KIBIN	121	Kibin	60.229
		122	Ketos	
		123	Cijeruk	
		124	Nagara	
		125	Nambo Ilir	
		126	Barengkok	
		127	Sukamaju	
		128	Tambak	
		129	Ciagel	
12	CARENANG	130	Carenang	41.002
		131	Pamanuk	
		132	Mandaya	
		133	Teras	
		134	Ragas Masigit	
		135	Walikukun	
		136	Panenjoan	
		137	Mekarsari	
13	BINUANG	138	Binuang	33.350
		139	Cakung	
		140	Renged	
		141	Gembor	
		142	Warakas	
		143	Sukamampir	
		144	Lamaran	
14	PETIR	145	Petir	64.489
		146	Cirangkong	
		147	Tambiluk	
		148	Sindangsari	
		149	Padasuka	
		150	Seuat	
		151	Nagara Padang	

No.	Kecamatan	No.	Desa	Jumlah Penduduk
		152	Kadu Genep	
		153	Cireundeu	
		154	Sanding	
		155	Kampung Baru	
		156	Mekar Baru	
		157	Seuat Jaya	
		158	Kubang Jaya	
		159	Bojong Nangka	
15	TUNJUNGTEJA	160	Tunjungteja	49.035
		161	Sukasari	
		162	Panunggulan	
		163	Malanggah	
		164	Kemuning	
		165	Bojong Menteng	
		166	Bojong Catang	
		167	Bojong Pandan	
16	BAROS	168	Pancaregang	61.444
		169	Baros	
		170	Tejamari	
		171	Panyirapan	
		172	Sidamukti	
		173	Sukacai	
		174	Tamansari	
		175	Sindangmandi	
		176	Cisalam	
		177	Sukamanah	
		178	Sukamenak	
		179	Curug Agung	
		180	Padasuka	
		181	Sinarmukti	
17	CIKEUSAL	182	Suka Indah	80.893
		183	Cikeusal	
		184	Dahu	
		185	Katulisan	
		186	Sukamaju	
		187	Cilayang	
		188	Sukamenak	
		189	Cimaung	
		190	Panyabrangan	
		191	Gandayasa	

No.	Kecamatan	No.	Desa	Jumlah Penduduk
		192	Bantarpanjang	
		193	Sukaratu	
		194	Harundang	
		195	Sukarame	
		196	Panosogan	
		197	Mongpok	
		198	Sukaraja	
		199	Cilayang Guha	
		18	PAMARAYAN	
201	Damping			
202	Wirana			
203	Keboncau			
204	Pudar			
205	Binong			
206	Sangiang			
207	Kampungbaru			
208	Pasirlimus			
209	Pasir Kembang			
19	KOPO	210	Kopo	56.488
		211	Garut	
		212	Nanggung	
		213	Cidahu	
		214	Nyompok	
		215	Gabus	
		216	Carenang Udik	
		217	Rancasumur	
		218	Babakanjaya	
219	Mekarbaru			
20	JAWILAN	220	Jawilan	63.401
		221	Bojot	
		222	Cemplang	
		223	Pagintungan	
		224	Pasirbuyut	
		225	Majasari	
		226	Parakan	
		227	Kareo	
		228	Junti	
21	CIOMAS	229	Ujungtebu	44.764
		230	Siketug	
		231	Lebak	

No.	Kecamatan	No.	Desa	Jumlah Penduduk
		232	Pondok Kahuru	
		233	Sukabares	
		234	Sukarena	
		235	Sukadana	
		236	Cemplang	
		237	Cisitu	
		238	Citaman	
		239	Panyaungan Jaya	
22	PABUARAN	240	Pabuaran	46.182
		241	Kadubeureum	
		242	Tanjungsari	
		243	Pancanegara	
		244	Sindangsari	
		245	Sindangheula	
		246	Pasanggrahan	
		247	Talaga Warna	
23	PADARINCANG	248	Padarincang	72.386
		249	Bugel	
		250	Cibojong	
		251	Citasuk	
		252	Cisaat	
		253	Ciomas	
		254	Barugbug	
		255	Batu Kuwung	
		256	Kramatlaban	
		257	Kalumpang	
		258	Kadubeureum	
		259	Cipayung	
		260	Curug Goong	
		261	Kadu Kempong	
24	ANYAR	262	Anyar	59.700
		263	Sindang Mandi	
		264	Cikoneng	
		265	Tanjungmanis	
		266	Bandulu	
		267	Bunihara	
		268	Kosambironyok	
		269	Banjarsari	
		270	Mekarsari	
		271	Sindangkarya	

No.	Kecamatan	No.	Desa	Jumlah Penduduk
		272	Tambang Ayam	
		273	Grogol Indah	
25	CINANGKA	274	Cinangka	61.910
		275	Bantarwaru	
		276	Pasauran	
		277	Bulakan	
		278	Karang Suraga	
		279	Umbul Tanjung	
		280	Kubang Baros	
		281	Rancasanggal	
		282	Cikolelet	
		283	Sindanglaya	
		284	Kamasan	
		285	Bantarwangi	
		286	Mekarsari	
		287	Baros Jaya	
26	MANCAK	288	Mancak	50.994
		289	Ciwarna	
		290	Angsana	
		291	Talaga	
		292	Cikedung	
		293	Sigedong	
		294	Sangiang	
		295	Pasirwaru	
		296	Waringin	
		297	Winong	
		298	Batukuda	
		299	Labuan	
		300	Bale Kambang	
		301	Bale Kencana	
27	GUNUNGSARI	302	Gunungsari	24.924
		303	Ciherang	
		304	Tamiang	
		305	Sukalaba	
		306	Kaduagung	
		307	Luwuk	
		308	Curug Sulanjana	
28	BANDUNG	309	Bandung	39.206
		310	Mander	
		311	Panamping	

No.	Kecamatan	No.	Desa	Jumlah Penduduk
		312	Pangawinan	
		313	Malabar	
		314	Blokang	
		315	Babakan	
		316	Pringwulung	
29	LEBAK WANGI	317	Kamaruton	40.215
		318	Teras Bendung	
		319	Lebak Wangi	
		320	Lebak Kepuh	
		321	Kencana Harapan	
		322	Pegandikan	
		323	Purwadadi	
		324	Bolang	
		325	Tirem	
		326	Kebonratu	

e. Jumlah perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah

Tabel 4 Jumlah perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah

No.	Nama Perangkat Daerah	Unit Kerja	Jumlah Pegawai
1.	Sekretariat Daerah	1) Bagian Tata Pemerintahan 2) Bagian Organisasi Reformasi Birokrasi 3) Bagian Hukum 4) Bagian Administrasi Pembangunan 5) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 6) Bagian Kesejahteraan Rakyat 7) Bagian Perekonomian 8) Bagian Umum dan Perlengkapan 9) Bagian Perencanaan dan Keuangan 10) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	142
2.	Sekretariat DPRD	1) Sekretariat 2) Bagian Umum Kepegawaian 3) Bagian Keuangan 4) Bagian Hubungan Masyarakat	28
3.	Inspektorat	1) Inspektur 2) Sekretaris Inspektur 3) Kepala Sub Bagian 4) Inspektur Pembantu Wilayah I	76

No.	Nama Perangkat Daerah	Unit Kerja	Jumlah Pegawai
		5) Inspektur Pembantu Wilayah II 6) Inspektur Pembantu Wilayah III 7) Inspektur Pembantu Wilayah IV 8) Inspektur Pembantu Wilayah V 9) Pelaksana	
4.	Dinas Kesehatan	1) Sekretariat 2) Bidang Pelayanan Kesehatan 3) Bidang Kesehatan Masyarakat 4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 5) Bidang Sumber Daya Kesehatan, Sarana dan Kefarmasian	965
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1) Sekretariat 2) Bidang Sarana Dan Prasarana Pendidikan 3) Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 4) Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar 5) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Kesetaraan Dan Keaksaraan, Kursus Dan Pelatihan 6) Bidang Kebudayaan	6.308
6.	Dinas Sosial	1) Bidang Pemberdayaan Sosial 2) Bidang Rehabilitasi Sosial 3) Bidang Penanganan dan Perlindungan korban bencana 4) Bidang Perlindungan Jaminan social dan fasilitasi penanganan fakir miskin	32
7.	Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi	1) Sekretariat 2) Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja 3) Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga kerja 4) Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek	39
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1) Sekretariat 2) Bidang pelayanan Pendaftaran Penduduk 3) Bidang Pencatatan Sipil 4) Bidang Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan	63

No.	Nama Perangkat Daerah	Unit Kerja	Jumlah Pegawai
		5) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	
9.	Dinas Perhubungan	1) Sekertariat 2) Bidang pelayaran dan penerbangan 3) Bidang lalu lintas jalan 4) Bidang angkutan jalan 5) Bidang keselamatan jalan	69
10.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1) Sekretariat 2) Bidang Koperasi 3) Bidang UMKM 4) Bidang Perindustri 5) Bidang Perdagangan	54
11.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	1) Sekretariat 2) Bidang pemuda dan olahraga 3) Bidang peningkatan daya tarik destinasi pariwisata 4) Bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif	24
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1) Sekretariat 2) Bidang pembangunan dan kemasyarakatan 3) Bidang pemberdayaan masyarakat 4) Bidang pemerintahan desa 5) Bidang perencanaan, keuangan dan aset desa	34
13.	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1) Sekretariat 2) Bidang Pengendalian Penduduk & Kesejahteraan Keluarga 3) Bidang Keluarga Berencana 4) Bidang Pemberdayaan Perempuan & Pengarusutamaan Gender 5) Bidang Perlindungan Perempuan & Anak 6) UPT PPA 7) UPT KB	41
14.	Dinas Lingkungan Hidup	1) Sekretariat 2) Bidang Perencanaan dan Penataan Lingkungan Hidup. 3) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH. 4) Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan LH. 5) Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3. 6) UPT Persampahan 7) UPT Laboratorium	85

No.	Nama Perangkat Daerah	Unit Kerja	Jumlah Pegawai
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1) Sekretariat 2) Bidang Penanaman Modal 3) Bidang Perizinan usaha 4) Bidang Perizinan tertentu dan non perizinan 5) Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	43
16.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1) Sekretariat 2) Bidang Perumahan 3) Bidang Kawasan Permukiman 4) Bidang Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum	36
17.	Satuan Polisi Pamong Praja	1) Sekretariat 2) Bidang Penegakan Perundang- undangan Daerah 3) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 4) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Pemberdayaan Linmas	59
18.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1) Sekretariat 2) Bidang Bina konstruksi 3) Bidang Bina Marga 4) Bidang Sumber Daya Air 5) Bidang Sanitasi dan Air Minum 6) Bidang Penataan Bangunan 7) Bidang Tata Ruang 8) UPT Peralatan dan Perbengkelan 9) UPT Pengukuran dan Pengujian Bahan Konstruksi	230
19.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1) Sekretariat 2) Bidang Ketahanan Pangan 3) Bidang Sarana Pertanian 4) Bidang Prasaran Pertanian 5) Bidang Penanggulangan Bencana & Pembinaan Usaha Pertanian 6) Bidang Peternakan & Kesehatan Hewan 7) Bidang Penyuluhan 8) UPTD	194
20.	Dinas Perikanan	1) Sekretariat 2) Bidang Perikanan Budidaya 3) Bidang Perikanan Tangkap 4) Bidang Pengelolaan, Pemasaran Hasil Perikanan & Pengawasan Sumber Daya Perikanan	42

No.	Nama Perangkat Daerah	Unit Kerja	Jumlah Pegawai
		5) UPT TPI 6) UPT LKIL 7) UPT Perbenihan ikan	
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	1) Sekretariat 2) Bidang Pengolahan Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan 3) Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca 4) Bidang Kearsipan	21
22.	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	1) Sekretariat 2) Bidang Komunikasi dan Informasi Publik 3) Bidang Persandian dan Data Statistik 4) Bidang Aplikasi dan Teknologi Informatika	30
23.	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1) Sekretariat 2) Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam (Sda) 3) Bidang Penelitian Dan Pengembangan 4) Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia 5) Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Dan Kewilayahan 6) Bidang Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	45
24.	Badan Kepegawaian dan Sumber daya Manusia	1) Sekretariat 2) Bidang Pengadaan, Data dan Pemberhentian 3) Bidang Mutasi Promosi dan Pembinaan ASN 4) Bidang Pengembangan SDM	43
25.	Badan Pendapatan Daerah	1) Sekretariat 2) Bidang perencanaan dan pengawasan pendapatan Daerah 3) Bidang penyuluhan data dan informasi 4) Bidang pendataan dan penetapan 5) Bidang penagihan verifikasi dan pemeriksaan	72

No.	Nama Perangkat Daerah	Unit Kerja	Jumlah Pegawai
		6) UPT Pelayanan Pajak Daerah	
26.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1) Sekretariat 2) Bidang Akuntansi 3) Bidang Anggaran 4) Bidang Aset 5) Bidang Perbendaharaan	43
27.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1) Sekretariat 2) Bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, social, budaya, agama 3) Bidang Poldagri dan Ormas 4) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	20
28.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1) Sekretariat 2) Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan 3) Bidang Penanganan Darurat 4) Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi 5) Bidang Pemadam Kebakaran	52
29.	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Dradjat Prawiranegara	1) Bagian Keuangan 2) Bagian Tata Usaha 3) Bagian Anggaran Program, Evaluasi & Pelaporan 4) Bidang Penunjang Non Medis 5) Bidang Penunjang Medis 6) Bidang Keperawatan dan Kebidanan 7) Kepala Bidang Pelayanan Medis	673
30.	29 Kecamatan		

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Tabel 5 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	%
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.061.558.897.765,00	878.927.795.941,00	(182.631.101.824,00)	82,80
4.1.01	Pajak Daerah	687.998.284.828,00	539.805.674.041,00	(148.192.610.787,00)	78,46
4.1.02	Retribusi Daerah	80.733.720.338,00	35.316.556.150,00	(45.417.164.188,00)	43,74
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.844.221.657,00	21.844.221.657,00	0,00	100,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	270.982.670.942,00	281.961.344.093,00	10.978.673.151,00	104,05
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.411.653.094.773,00	2.360.398.841.343,00	(51.254.253.430,00)	97,87
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.105.611.462.409,00	2.068.246.479.235,00	(37.364.983.174,00)	98,23
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	306.041.632.364,00	292.152.362.108,00	(13.889.270.256,00)	95,46

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	%
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.343.478.000,00	10.272.840.346,00	(3.070.637.654,00)	76,99
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.343.478.000,00	10.272.840.346,00	(3.070.637.654,00)	76,99
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	3.486.555.470.538,00	3.249.599.477.630,00	(236.955.992.908,00)	93,20
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	2.570.152.978.119,00	2.425.562.062.591,00	(144.590.915.528,00)	94,37
5.1.01	Belanja Pegawai	1.393.496.719.970,00	1.321.436.650.750,00	(72.060.069.220,00)	94,83
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.019.054.861.179,00	948.772.846.825,00	(70.282.014.354,00)	93,10
5.1.05	Belanja Hibah	149.102.350.970,00	147.121.371.516,00	(1.980.979.454,00)	98,67
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.499.046.000,00	8.231.193.500,00	(267.852.500,00)	96,85
5.2	BELANJA MODAL	430.497.662.704,00	360.811.320.041,00	(69.686.342.663,00)	83,81
5.2.01	Belanja Modal Tanah	44.681.692.300,00	748.902.305,00	(43.932.789.995,00)	1,68
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	133.862.149.808,00	111.613.710.440,00	(22.248.439.368,00)	83,38
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95.025.029.660,00	91.356.409.648,00	(3.668.620.012,00)	96,14
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	141.769.776.796,00	133.901.375.096,00	(7.868.401.700,00)	94,45
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.859.014.140,00	22.895.922.552,00	8.036.908.412,00	154,09
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	300.000.000,00	295.000.000,00	(5.000.000,00)	98,33
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.475.000.000,00	119.786.500,00	(5.355.213.500,00)	2,19
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.475.000.000,00	119.786.500,00	(5.355.213.500,00)	2,19
5.4	BELANJA TRANSFER	545.832.672.400,00	495.591.536.367,00	(50.241.136.033,00)	90,80
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	81.155.933.400,00	31.058.297.367,00	(50.097.636.033,00)	38,27
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	464.676.739.000,00	464.533.239.000,00	(143.500.000,00)	99,97
	JUMLAH BELANJA DAERAH	3.551.958.313.223,00	3.282.084.705.499,00	(269.873.607.724,00)	92,40
	SURPLUS / (DEFISIT)	(65.402.842.685,00)	(32.485.227.869,00)	32.917.614.816,00	49,67
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	69.969.842.685,00	69.969.842.685,00	0,00	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	69.969.842.685,00	69.969.842.685,00	0,00	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.567.000.000,00	4.566.821.934,00	(178.066,00)	100,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	100,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	3.067.000.000,00	3.066.821.934,00	(178.066,00)	99,99
	PEMBIAYAAN NETTO	65.402.842.685,00	65.403.020.751,00	178.066,00	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	32.917.792.882,00	32.917.792.882,00	0,00

Sumber data: BPKAD (unaudited)

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan strategis pemerintah daerah

- 1) Kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat belum merata.
- 2) Masih adanya kasus- kasus AKI dan AKB serta Stunting yang terjadi di tengah-tengah masyarakat serta belum meratanya akses dan layanan kesehatan yang berkualitas.
- 3) Belum tuntasnya pengembangan infrastruktur dasar daerah dan pembangunan pusat pemerintahan kabupaten Serang.
- 4) Masih tingginya angka kemiskinan ditengah-tengah masyarakat, terutama terkait dengan tingginya angka pengangguran.

- 5) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Serang terutama pada Organisasi Pemerintah daerah belum seluruhnya mencapai tingkatan pada standar yang baik.
- 6) Kegiatan perekonomian masyarakat belum berkembang secara optimal terutama pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis sumber daya ekonomi local.
- 7) Tingkat kesadaran masyarakat yang belum mencerminkan ketentraman, keamanan dan ketertiban yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 8) Belum meratanya pembangunan antar wilayah (kecamatan).
- 9) Masih banyak ditemukan tatakelola lingkungan hidup baik yang berada di wilayah industri, permukiman dan perumahan belum sesuai dengan standar lingkungan hidup, terutama terkait dengan persoalan penanganan pencemaran lingkungan dan limbah.
- 10) Masih banyak ditemukan kondisi kualitas lingkungan permukiman dan perumahan yang belum memenuhi persyaratan hidup layak, terutama terkait dengan rumah tidak layak huni, kualitas sanitasi lingkungan dan persampahan.
- 11) Masih tingginya angka ketergantungan fiscal daerah pada Pemerintah dan Provinsi Banten dalam hal pendanaan pembangunan.
- 12) Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat masih kurang memadai.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi :

"TERWUJUDNYA KABUPATEN SERANG YANG SEMAKIN MAJU, SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN AGAMIS"

Misi :

- 1) Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat
- 2) Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional
- 3) Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, penataan ruang dan permukiman yang memadai dan berkualitas
- 4) Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan
- 5) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang prima didukung kapasitas birokrasi yang berintegritas, kompeten dan profesional dengan dilandasi oleh keadilan dan kesetaraan gender
- 6) Memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan bernegara

- c. Program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah

OPD	Program
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
Dinas Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Rumah Sakit dr. Dradjat Prawiranegara	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

OPD	Program
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Satuan Polisi Pamong Praja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

OPD	Program
Dinas Sosial	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

OPD	Program
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B)
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	PROGRAM PENATAAN DESA
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

OPD	Program
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
Dinas Perhubungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
Dinas Komunikasi, Informatika, persandian dan Statistik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

OPD	Program
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
Dinas Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

OPD	Program
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Dinas Perikanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Sekretariat DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA


OPD	Program
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Badan Pendapatan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Inspektorat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

OPD	Program
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL



d. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan

Tabel 6 kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen

OPD	Program	Kegiatan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan


OPD	Program	Kegiatan
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Dinas Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Peningkatan Pelayanan BLUD
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

OPD	Program	Kegiatan
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota




OPD	Program	Kegiatan
Rumah Sakit dr. Dradjat Prawiranegara	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Peningkatan Pelayanan BLUD
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah Ha dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

OPD	Program	Kegiatan
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi


OPD	Program	Kegiatan	
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	
		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

OPD	Program	Kegiatan
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<p>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota


OPD	Program	Kegiatan
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		
Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)		
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah (Sepuluh) Ha	
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah (Sepuluh) Ha	
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	

OPD	Program	Kegiatan
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil
Satuan Polisi Pamong Praja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

OPD	Program	Kegiatan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
	Dinas Sosial	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

OPD	Program	Kegiatan	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		

OPD	Program	Kegiatan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Pembinaan Sejarah Lokal dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah

OPD	Program	Kegiatan	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		
	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		
	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		
	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		


OPD	Program	Kegiatan
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

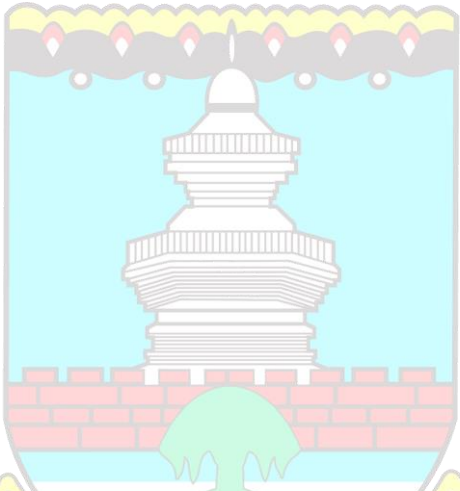
OPD	Program	Kegiatan
Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B)	Penyimpanan sementara Limbah B
		Pengumpulan Limbah B dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota


OPD	Program	Kegiatan
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

OPD	Program	Kegiatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Kependudukan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

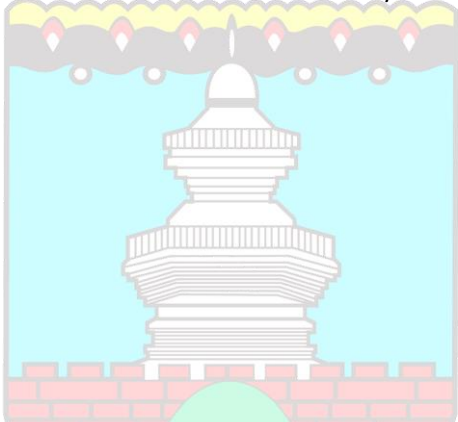
OPD	Program	Kegiatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

OPD	Program	Kegiatan
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

OPD	Program	Kegiatan
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
Dinas Perhubungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

OPD	Program	Kegiatan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	 <p data-bbox="837 493 1375 560">PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</p>	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

OPD	Program	Kegiatan
		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
		Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter
	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian

OPD	Program	Kegiatan
		Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Komunikasi, Informatika, persandian dan Statistik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	

OPD	Program	Kegiatan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Koperasi,UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	


OPD	Program	Kegiatan
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

OPD	Program	Kegiatan
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

OPD	Program	Kegiatan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah

OPD	Program	Kegiatan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
	Dinas Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

OPD	Program	Kegiatan
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

OPD	Program	Kegiatan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pengembangan Prasarana Pertanian
		Pembangunan Prasarana Pertanian
		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota

OPD	Program	Kegiatan
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

OPD	Program	Kegiatan
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

OPD	Program	Kegiatan
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Dinas Perikanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

OPD	Program	Kegiatan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	<p>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</p> <p>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</p> <p>Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p>
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	<p>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</p> <p>Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</p>
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	<p>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</p>
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	<p>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</p>

OPD	Program	Kegiatan
		<p>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</p> <p>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</p>
Sekretariat Daerah	<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p> 	<p>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</p> <p>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</p> <p>Penataan Organisasi</p> <p>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</p>

OPD	Program	Kegiatan
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
		Fasilitasi Kerja Sama Daerah
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
Sekretariat DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
		Layanan Administrasi DPRD
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
		Pembahasan Kebijakan Anggaran
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan


OPD	Program	Kegiatan
		Peningkatan Kapasitas DPRD
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
		Fasilitasi Tugas DPRD
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

OPD	Program	Kegiatan	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
	Badan Pendapatan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengembangan Inovasi dan Teknologi
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

OPD	Program	Kegiatan
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah

OPD	Program	Kegiatan
Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
		Mutasi dan Promosi ASN
		Pengembangan Kompetensi ASN
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Teknis
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
Inspektorat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

OPD	Program	Kegiatan	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
			Pendampingan dan Asistensi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

OPD	Program	Kegiatan
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dasar pertimbangan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah karena SPM merupakan kebutuhan dasar setiap warga negara yang berhak diperoleh secara minimal tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib mendasar yang kewenangannya sudah diberikan kepada Pemerintah Daerah dengan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran.

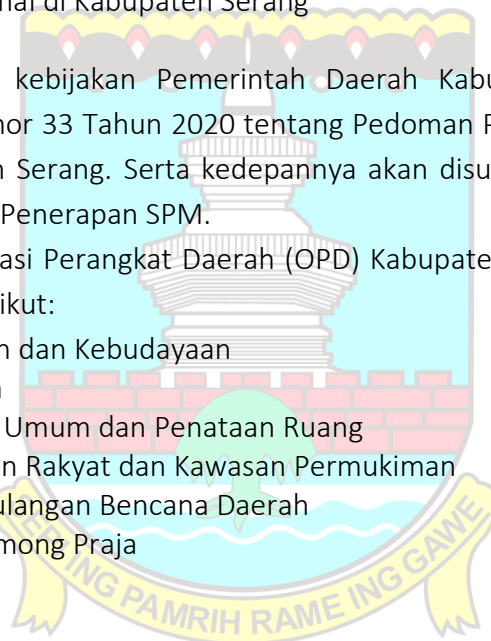
Dasar penerapan SPM yaitu:

1. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
4. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Serang

Sebagai aturan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Serang. Serta kedepannya akan disusun Peraturan Bupati Serang tentang Rencana Aksi Penerapan SPM.

Adapun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Serang yang melaksanakan SPM yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Dinas Sosial



BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Tabel 7 Capaian Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1 (2022)	Capaian Kinerja Tahun N (2023)	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	71,99	72,63	0.889
2	Angka Kemiskinan (%)	4,96	4,85	(2,218)
3	Angka Pengangguran (%)	10.61	9.94	(6.315)
4	Pertumbuhan Ekonomi (miliar rupiah)	57.607,11	60.370,56	4,797
5	Pendapatan Perkapita (juta rupiah)	52,96	56,52	6,722
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,28	0,27	(3,571)

Sumber data: BPS

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No.	Urusan	No. IKK Outcome	No. IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Pendidikan	1.a.1	1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	796	Disdikbud
			2	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	70.653	Disdikbud
			3	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	70.653	Disdikbud
			4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	4080	Disdikbud
			5	Jumlah pendidik pada PAUD	4618	Disdikbud

No.	Urusan	No. IKK Outcome	No. IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
			6	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	196	Disdikbud
			7	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	143	Disdikbud
		1.a.2, 1.a.3	1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	833	Disdikbud
			2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	195.001	Disdikbud
			3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	90.097	Disdikbud
			4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	199.536	Disdikbud
			5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	90.097	Disdikbud
			6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	9838	Disdikbud
			7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	7008	Disdikbud
			8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	7.165	Disdikbud
			9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	7008	Disdikbud

No.	Urusan	No. IKK Outcome	No. IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
			10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	2386	Disdikbud
			11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	1130	Disdikbud
			12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	1.771	Disdikbud
			13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	969	Disdikbud
			14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	4.091	Disdikbud
			15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	4.222	Disdikbud
			16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	819	Disdikbud
			17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	356	Disdikbud
			18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	833	Disdikbud
			19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	384	Disdikbud
		1.a.4	1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	64	Disdikbud

No.	Urusan	No. IKK Outcome	No. IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
			2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	16.802	Disdikbud
			3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	16.802	Disdikbud
			4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	829	Disdikbud
			5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	763	Disdikbud
			6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	763	Disdikbud
			7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	80	Disdikbud
			8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	80	Disdikbud
			2	Kesehatan	1.b.1	1
		1.b.2	1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	6	Dinkes
		1.b.3	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	25.800	Dinkes
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	2.326	Dinkes
		1.b.4	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	34.147	Dinkes
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	2.326	Dinkes
		1.b.5	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	36.981	Dinkes

No.	Urusan	No. IKK Outcome	No. IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	2.323	Dinkes
		1.b.6	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	690.267	Dinkes
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	183	Dinkes
		1.b.7	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	14.483	Dinkes
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	214	Dinkes
		1.b.8	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	842.128	Dinkes
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	152	Dinkes
		1.b.9	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0	Dinkes
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	152	Dinkes
		1.b.10	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	497	Dinkes
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	124	Dinkes
		1.b.11	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	350	Dinkes
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	152	Dinkes
		1.b.12	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	125	Dinkes
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	27	Dinkes
		1.b.13	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	107.030	Dinkes
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	136	Dinkes
		1.b.14	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	94	Dinkes

No.	Urusan	No. IKK Outcome	No. IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	120	Dinkes
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1,1.c.2	1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	DPUPR
			2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	DPUPR
			3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	0	DPUPR
			4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	0	DPUPR
			5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	0	DPUPR
			6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0	DPUPR
			7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	0	DPUPR
		1.c.3	1	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	44.62	DPUPR
			2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	0	DPUPR
			3	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	0	DPUPR
		1.c.4	1	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	Ada	DPUPR
			2	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	Ada	DPUPR

No.	Urusan	No. IKK Outcome	No. IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
			3	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	Ada	DPUPR
			4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	0	DPUPR
			5	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	0	DPUPR
		1.c.5	1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	364511	DPUPR
			2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	4715	DPUPR
			3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	368190	DPUPR
			4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	0	DPUPR
			5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	0	DPUPR
			6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	4715	DPUPR
			7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	364511	DPUPR
			8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	8	DPUPR
			9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	4715	DPUPR
			10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	0	DPUPR
			11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	0	DPUPR

No.	Urusan	No. IKK Outcome	No. IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
			12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	0	DPUPR
			13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	4715	DPUPR
			14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0	DPUPR
		1.c.6	1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	78,57	DPUPR
			2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	1673	DPUPR
			3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Ada	DPUPR
			4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Ada	DPUPR
			5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	0	DPUPR
			6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	0	DPUPR
			7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	0	DPUPR
			8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	10	DPUPR
		1.c.7	1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	1004,39	DPUPR
			2	Panjang jalan yang dibangun	3915	DPUPR
			3	Panjang jembatan yang dibangun	100	DPUPR
			4	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	27687,5	DPUPR
			5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	18,5	DPUPR

No.	Urusan	No. IKK Outcome	No. IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
			6	Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	27687,5	DPUPR
			7	Panjang jembatan yang direhabilitasi	118,5	DPUPR
			8	Panjang jalan yang dipelihara	17854,15	DPUPR
			9	Panjang jembatan yang dipelihara	389	DPUPR
		1.c.8	1	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	2	DPUPR
			2	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	283	DPUPR
			3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	283	DPUPR
			4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Tidak	DPUPR
			5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	0	DPUPR
			6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	0	DPUPR
			7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	0	DPUPR
			8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	1	DPUPR

No.	Urusan	No. IKK Outcome	No. IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
			9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	0	DPUPR
			10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang memb	0	DPUPR
			11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	0	DPUPR
			12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	0	DPUPR
			13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Tidak	DPUPR
			14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	DPUPR
			15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	DPUPR
			16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	249	DPUPR
			17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi	0	DPUPR

No.	Urusan	No. IKK Outcome	No. IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
				pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		
			18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	0	DPUPR
			19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0	DPUPR
			20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	0	DPUPR
			21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	0	DPUPR
			22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	DPUPR
			23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	DPUPR
			24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	249	DPUPR
			25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	DPUPR
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	0	DPRKP
			2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0	DPRKP

No.	Urusan	No. IKK Outcome	No. IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
			3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0	DPRKP
			4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0	DPRKP
			5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	DPRKP
			6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	DPRKP
			7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	DPRKP
			8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0	DPRKP
			9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	DPRKP
		1.d.2	1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPRKP
			2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPRKP
			3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPRKP
			4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPRKP
			5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPRKP

No.	Urusan	No. IKK Outcome	No. IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
			6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	DPRKP
		1.d.3	1	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	239,5	DPRKP
			2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	945	DPRKP
			3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	82,18	DPRKP
		1.d.4	1	Jumlah rumah di kab/kota	343.700	DPRKP
			2	Jumlah unit PK RTLH	945	DPRKP
			3	Jumlah rumah tidak layak huni	1.678	DPRKP
			4	Jumlah rumah yang tidak dihuni	0	DPRKP
			5	Rasio rumah dan KK	1,3	DPRKP
			6	Jumlah rumah pembangunan baru	0	DPRKP
		1.d.5	1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	130	DPRKP
			2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	130	DPRKP
			3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	72.731	DPRKP
			4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	72.731	DPRKP
			5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	130	DPRKP
			6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	72.731	DPRKP
			7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	107	DPRKP
			8	Jumlah pengembang yang terregistrasi	107	DPRKP
			9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	107	DPRKP
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	26	Satpol PP & BPBD
			2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	191	Satpol PP & BPBD

No.	Urusan	No. IKK Outcome	No. IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
			3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	4	Satpol PP & BPBD
			4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	8	Satpol PP & BPBD
			5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	16	Satpol PP & BPBD
			6	Tersedianya sarana prasarana minimal	294	Satpol PP & BPBD
		1.e.3	1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	0	Satpol PP & BPBD
			2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100	Satpol PP & BPBD
		1.e.4	1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	0	Satpol PP & BPBD
			2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100	Satpol PP & BPBD
			3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	0.51	Satpol PP & BPBD
			4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0.51	Satpol PP & BPBD
			5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100	Satpol PP & BPBD
			6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	100	Satpol PP & BPBD

No.	Urusan	No. IKK Outcome	No. IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
		1.e.5	1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	0	Satpol PP & BPBD
			2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100	Satpol PP & BPBD
			3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100	Satpol PP & BPBD
			4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100	Satpol PP & BPBD
		1.e.6	1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	144	Satpol PP & BPBD
			2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	1	Satpol PP & BPBD
			3	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	1	Satpol PP & BPBD
			4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Tidak	Satpol PP & BPBD
			5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	59	Satpol PP & BPBD
			6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	22	Satpol PP & BPBD

No.	Urusan	No. IKK Outcome	No. IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
			7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	22	Satpol PP & BPBD
			8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	4	Satpol PP & BPBD
6	Sosial	1.f.1	1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	93	Dinsos
			2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	93	Dinsos
			3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	0	Dinsos
			4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	93	Dinsos
			5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	0	Dinsos
			6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	93	Dinsos
			7	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	0	Dinsos
			8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	93	Dinsos
			9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	2	Dinsos
			10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	0	Dinsos
			11	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	0	Dinsos

No.	Urusan	No. IKK Outcome	No. IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
			12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	93	Dinsos
			13	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	Dinsos
			14	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	1	Dinsos
			15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosia	93	Dinsos
			16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	93	Dinsos
			17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	93	Dinsos
			18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	93	Dinsos
			19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	93	Dinsos
			20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	93	Dinsos

No.	Urusan	No. IKK Outcome	No. IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
			21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	93	Dinsos
		1.f.2	1	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	4.247	Dinsos
			2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	1.079	Dinsos
			3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0	Dinsos
			4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0	Dinsos
			5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Tidak	Dinsos
			6	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	199	Dinsos
7	Tenaga Kerja	2.a.1	1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	1	Disnakertrans
			2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	96,28	Disnakertrans
			3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	10	Disnakertrans
		2.a.2	1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	84	Disnakertrans
			2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	100	Disnakertrans
			3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	41,28	Disnakertrans
			4	Persentase LPK yang terakreditasi	17,74	Disnakertrans
			5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	91,93	Disnakertrans
			6	Jumlah penganggur yang dilatih	516	Disnakertrans
7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100	Disnakertrans			
8	Persentase penyerapan lulusan	24,42	Disnakertrans			
9	Lulusan bersertifikat kompetensi	15,5	Disnakertrans			

No.	Urusan	No. IKK Outcome	No. IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
			10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	1	Disnakertrans
			11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	1	Disnakertrans
		2.a.3	1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	100	Disnakertrans
			2	Data tingkat produktivitas total	1	Disnakertrans
		2.a.4	1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	40,58	Disnakertrans
			2	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	81,8	Disnakertrans
			3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	33	Disnakertrans
			4	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	81,8	Disnakertrans
			5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	64,66	Disnakertrans
			6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	7,2	Disnakertrans
			7	Jumlah mogok kerja	6	Disnakertrans
			8	Jumlah penutupan perusahaan	4	Disnakertrans
			9	Jumlah perselisihan kepentingan	2	Disnakertrans
			10	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	Disnakertrans
			11	Jumlah perselisihan PHK	50	Disnakertrans
			12	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	50	Disnakertrans

No.	Urusan	No. IKK Outcome	No. IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
			13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	0	Disnakertrans
			14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	1	Disnakertrans
			15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	32,73	Disnakertrans
		2.a.5	1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	1.163	Disnakertrans
			2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	12.275	Disnakertrans
			3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	78	Disnakertrans
			4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0 Surat Keterangan	Disnakertrans
			5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	3	Disnakertrans
			6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0 Surat Keterangan	Disnakertrans
			7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	0 Surat Keterangan	Disnakertrans
			8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	11.499	Disnakertrans
			9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	50	Disnakertrans
			10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	619	Disnakertrans

No.	Urusan	No. IKK Outcome	No. IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
			11	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	0 Surat Keterangan	Disnakertrans
			12	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0 Surat Keterangan	Disnakertrans
			13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0 Surat Keterangan	Disnakertrans
			14	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	0 Surat Keterangan	Disnakertrans
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.1	1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	0	DKBP3A
			2	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	0	DKBP3A
		2.g.2	1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	18	DKBP3A
			2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	0	DKBP3A
			3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	DKBP3A
			4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	0	DKBP3A
			5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	1	DKBP3A

No.	Urusan	No. IKK Outcome	No. IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
		2.g.3	1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	0	DKBP3A
			2	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	1777	DKBP3A
			3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	0	DKBP3A
			4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	1	DKBP3A
			5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	0	DKBP3A
			6	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	1	DKBP3A
			7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	DKBP3A
9	Pangan	2.h.1	1	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada / Tidak	DKPP
			2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada / Tidak	DKPP
			3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada / Tidak	DKPP
			4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada / Tidak	DKPP
			5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada / Tidak	DKPP
			6	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada / Tidak	DKPP

No.	Urusan	No. IKK Outcome	No. IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
			7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	348.654	DKPP
			8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada / Tidak	DKPP
10	Pertanahan	2.i.1, 2.i.2, 2.i.3, 2.i.4, 2.i.5, 2.i.6	1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	2	DPMPTSP
			2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0	DPMPTSP
			3	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.	0	DPMPTSP
			4	Dokumen Izin membuka tanah	100	DPMPTSP
			5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	100	DPMPTSP
11	Lingkungan Hidup	2.j.1	1a	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA)	19,684	DLH
			1b	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)	27,682	DLH
			1c	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)	17,023	DLH
		2.j.2	1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	3	DLH
		2.j.3	1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	100	DLH
			2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	12	DLH

No.	Urusan	No. IKK Outcome	No. IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
			3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten	0	DLH
			4	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota	0	DLH
			5	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	100	DLH
				Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani.Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkung		
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.k.1,2.k.2	1	Penerbitan akta perkawinan	124	Disdukcapil
2			Penerbitan akta perceraian	6	Disdukcapil	
3			Penerbitan akta kematian	5.377	Disdukcapil	
4			Penyajian data kependudukan	1	Disdukcapil	
13	Pemberdayaan masyarakat dan desa	2.l.1,2.l.2	1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	9	DPMD
2			Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0	DPMD	
3			Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	6	DPMD	
4			Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0	DPMD	

No.	Urusan	No. IKK Outcome	No. IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
14	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.1	1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada / Tidak	DKBP3A
			2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	20	DKBP3A
			3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	20,1	DKBP3A
			4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	17	DKBP3A
			5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	12	DKBP3A
		2.m.2	1	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100	DKBP3A
			2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	72,33	DKBP3A
			3	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	2	DKBP3A
			4	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	40,26	DKBP3A
		2.m.3	1	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	50,59	DKBP3A
			2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	21,763	DKBP3A
		15	Perhubungan	2.n.1,2.n.2	1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C
2	Terlaksananya pelayanan uji berkala				100	Dishub

No.	Urusan	No. IKK Outcome	No. IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
			3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	1	Dishub
			4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	33,75	Dishub
16	Komunikasi dan Informatika	2.o.1	1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	Diskominfosatik
			2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100	Diskominfosatik
			3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Ada/ Tidak	Diskominfosatik
		2.o.2	1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	100	Diskominfosatik
			2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100	Diskominfosatik
			3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	Diskominfosatik

No.	Urusan	No. IKK Outcome	No. IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
			4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100	Diskominfo
			5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	71,42	Diskominfo
			6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100	Diskominfo
			7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	100	Diskominfo
			8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	13,79	Diskominfo
			9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	13,79	Diskominfo
			10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	50	Diskominfo
			11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	100	Diskominfo
			12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	100	Diskominfo
			13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	100	Diskominfo
			14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada/ Tidak	Diskominfo
		2.o.3	1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan	100	Diskominfo

No.	Urusan	No. IKK Outcome	No. IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
				informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota		
			2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100	Diskominfosatik
			3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100	Diskominfosatik
17	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Diskoumperindag
			2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Diskoumperindag
			3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	3,29	Diskoumperindag
			4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	10,46	Diskoumperindag
			5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	10,46	Diskoumperindag

No.	Urusan	No. IKK Outcome	No. IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
			6	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,07	Diskoumperindag
			7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	10,46	Diskoumperindag
			8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	2,09	Diskoumperindag
			9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	36,47	Diskoumperindag
			10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	2,09	Diskoumperindag
			11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1,79	Diskoumperindag
			12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	10,46	Diskoumperindag
			13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	2,09	Diskoumperindag
		2.p.2	1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	100	Diskoumperindag
			2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	2,55	Diskoumperindag

No.	Urusan	No. IKK Outcome	No. IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
			3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	100	Diskoumperindag
			4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	1,78	Diskoumperindag
			5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	2,04	Diskoumperindag
			6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	2,37	Diskoumperindag
			7	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	2	Diskoumperindag
18	Penanaman Modal	2.q.1	1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	0	DPMPTSP
			2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	0	DPMPTSP
			3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	DPMPTSP
			4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	9	DPMPTSP
			5	Kegiatan pameran penanaman modal	3	DPMPTSP
			6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	7	DPMPTSP
			7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	3.197	DPMPTSP
			8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	57	DPMPTSP
			9	Laporan realisasi penanaman modal	10290794782000	DPMPTSP
			10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	43	DPMPTSP
			11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	115	DPMPTSP

No.	Urusan	No. IKK Outcome	No. IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
			12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	40	DPMPTSP
19	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.1	1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	80	Disporapar
			2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	Disporapar
		2.r.2	1	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	75	Disporapar
			2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	120	Disporapar
		2.r.3	1	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	81	Disporapar
			2	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	0 Surat Keterangan	Disporapar
20	Statistik	2.s.1, 2.s.2	1	Tersedianya buku profil daerah	Ada / Tidak	Diskominfoatik
			2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	58	Diskominfoatik
			3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	58	Diskominfoatik
			4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0	Diskominfoatik
			5	Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0	Diskominfoatik
			6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	0	Diskominfoatik
			7	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	0	Diskominfoatik
21	Persandian	2.t.1	1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding	0	Diskominfoatik

No.	Urusan	No. IKK Outcome	No. IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
				banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan		
			2	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	100	Diskominfoatik
			3	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	100	Diskominfoatik
			4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	0	Diskominfoatik
22	Kebudayaan	2.u.1	1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	38	Disdikbud
			2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	38	Disdikbud
			3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, mdan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	38	Disdikbud
			4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	15	Disdikbud
			5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	38	Disdikbud

No.	Urusan	No. IKK Outcome	No. IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
			6	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	0	Disdikbud
			7	Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0	Disdikbud
			8	Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	3	Disdikbud
			9	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	3	Disdikbud
			10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	Disdikbud
			11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	0	Disdikbud
			12	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	0	Disdikbud
			13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	0	Disdikbud
			14	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	0	Disdikbud
			15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	0	Disdikbud
			16	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	0	Disdikbud
			17	Peningkatan kompetensi SDM cagar budaya dan permuseuman kabupaten/kota	0	Disdikbud
			18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0	Disdikbud
			19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	Disdikbud
23	Perpustakaan	2.v.1	1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	0,559	DPKD

No.	Urusan	No. IKK Outcome	No. IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data		
			2	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	0,004	DPKD		
			3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,002	DPKD		
			4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	0,105	DPKD		
			5	Jumlah pemasyarakatangemar membaca di masyarakat	29	DPKD		
		2.v.2	1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	0	DPKD		
		2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	DPKD			
		3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	0	DPKD			
		24	Kearsipan	2.w.1	1	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	0,62	DPKD
		2			persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	24,56	DPKD	
		3			Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100	DPKD	
4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	75			DPKD			
2.w.2	1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK		1	DPKD			
2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	1		DPKD				
3	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	1		DPKD				

No.	Urusan	No. IKK Outcome	No. IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
			4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	1	DPKD
			5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	1	DPKD
			6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	1	DPKD
25	Kelautan dan Perikanan	3.a.1	1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	1.099	Dinas Perikanan
			2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	92	Dinas Perikanan
			3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten yang diterbitkan	110	Dinas Perikanan
			4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	240	Dinas Perikanan
			5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	7.470.117.880	Dinas Perikanan
26	Pariwisata	3.b.1, 3.b.2, 3.b.3, 3.b.4, 3.b.5	1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	193	Disporapar
			2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	80	Disporapar
			3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	145	Disporapar
			4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	19.873	Disporapar

No.	Urusan	No. IKK Outcome	No. IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
			5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	5	Disporapar
			6	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	0	Disporapar
			7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	14	Disporapar
			8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	4.75	Disporapar
			9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	100	Disporapar
			10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	5	Disporapar
27	Pertanian	3.c.1	1	Sarana pertanian yang diberikan	235	DKPP
			2	Prasarana pertanian yang digunakan	38	DKPP
			3	Penerbitan izin usaha pertanian	8	DKPP
			4	Persentase prasarana yang digunakan	100	DKPP
			5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	9,3	DKPP
		3.c.2	1	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	96,16	DKPP
28	Kehutanan	3.d.1	1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0	Kewenangan Provinsi
			2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0	
			3	Pemulihan ekosistem pada Tahura	0	
			4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	0	
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	3.e.1	1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	0	DPMPTSP
30	Perdagangan	3.f.1	1a	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan	100	Diskoumperindag

No.	Urusan	No. IKK Outcome	No. IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
			1b	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko swalayan	100	Diskoumperindag
			2	Persentase penerbitan TDG	100	Diskoumperindag
			3	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	0	Diskoumperindag
			4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	100	Diskoumperindag
			5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	100	Diskoumperindag
		3.f.1	1	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	100	Diskoumperindag
			2	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100	Diskoumperindag
			3	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	100	Diskoumperindag
		3.f.2	1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	60.739	Diskoumperindag
		3.f.3	1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	100	Diskoumperindag
			2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	100	Diskoumperindag
31	Perindustrian	3.g.1	1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	100	Diskoumperindag
		3.g.2	1	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	50	Diskoumperindag
		3.g.3	1	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	100	Diskoumperindag
			2	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	100	Diskoumperindag

No.	Urusan	No. IKK Outcome	No. IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data
		3.g.6	1	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	100	Diskoumperindag
32	Transmigrasi	2.h.1	1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	0 Surat Keterangan	Disnakertrans
			2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0 Surat Keterangan	Disnakertrans
			3	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0 Surat Keterangan	Disnakertrans

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

No.	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Pembilang/ Penyebut	Capaian Kinerja	Sumber Data
1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar					
- Pendidikan					
1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	61.546	91,244	Disdikbud
		Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten bersangkutan	67.452		

No.	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Pembilang/ Penyebut	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sedang belajar di sekolah dasar	195.966	100	Disdikbud
		Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten bersangkutan	195.966		
1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sedang belajar di sekolah menengah pertama	89.199	99,794	Disdikbud
		Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	89.383		
1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat/ sedang belajar di pendidikan kesetaraan	16.802	95,590	Disdikbud
		Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten yang bersangkutan	17.577		
- Kesehatan					
1.b.1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di kabupaten	956	0,55	Dinkes
		Jumlah penduduk di kabupaten	1.730.532		
1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS rujukan yang terakreditasi	4	66,666	Dinkes
		Jumlah RS di kabupaten	6		
1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	33.516	94,565	Dinkes
		Jumlah ibu hamil di kabupaten	35.442		

No.	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Pembilang/ Penyebut	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	33.808	100	Dinkes
		Jumlah ibu bersalin di kabupaten	33.808		
1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	31.274	94,483	Dinkes
		Jumlah bayi baru lahir di kabupaten	33.100		
1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	155.261	100	Dinkes
		Jumlah balita di kabupaten	155.261		
1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	202.892	100	Dinkes
		Jumlah anak pendidikan dasar di kabupaten	202.892		
1.b.8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-29 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	1.047.693	92,405	Dinkes
		Jumlah orang usia 15-29 tahun di kabupaten	1.133.799		
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	105.354	87,578	Dinkes
		Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten	120.297		
1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	251.729	77,800	Dinkes

No.	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Pembilang/ Penyebut	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Jumlah penderita hipertensi di kabupaten	323.557		
1.b.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	18.811	100	Dinkes
		Jumlah penderita DM di kabupaten	18.811		
1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	1.815	81,573	Dinkes
		Jumlah penderita ODGJ di kabupaten	2.225		
1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	34.300	100	Dinkes
		Jumlah penderita TBC di kabupaten	34.300		
1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	37.597	85,269	Dinkes
		Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten	44.092		
- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten (ha)	0	0 Surat Keterangan	DPUPR
		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten (ha)	1		

No.	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Pembilang/ Penyebut	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten (ha)	0	0 Surat Keterangan	DPUPR
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan kabupaten (ha)	1		
1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan yang dibangun (ha) ditingkatkan (ha) dioperasikan dan pelihara (ha)	4.204,9	45,177	DPUPR
		luas daerah irigrasi kewenangan kabupaten	9.307,436		
1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten	358.357	73,237	DPUPR
		Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten tersebut	489.311		
1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya di olah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	368.190	75,246	DPUPR
		Jumlah rumah di kabupaten	489.311		

No.	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Pembilang/ Penyebut	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kabupaten	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya	49.145	100	DPMPTSP
		Jumlah IMB yang berlaku	49.145		
1.c.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Panjang jalan kewenangan kabupaten yang mantap	620,15	61,743	DPUPR
		Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten	1.004,39		
1.c.8.1	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/ analis	283	94.333	DPUPR
		Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kabupaten	300		
1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	249	100	DPUPR
		jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	249		
- Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
1.d.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2021	0	0 Surat Keterangan	DPRKP
		jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2021	1		DPRKP

No.	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Pembilang/ Penyebut	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.d.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan+rumah tangga penerima subsidi uang sewa+rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni	0	0 Surat Keterangan	DPRKP
		Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima layanan	1		DPRKP
1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	82,18	34,313	DPRKP
		Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	239,5		
1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni	1.678	0,488	DPRKP
		Jumlah total unit rumah kabupaten	343.700		
1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	4.245	5,836	DPRKP
		Jumlah unit perumahan kabupaten/kota	72.731		
- Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
1.e.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani	22	100	Satpol PP
		Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	22		
1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	4	80	Satpol PP
		Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	5		

No.	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Pembilang/ Penyebut	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	436.517	100	BPBD
		Jumlah sasaran yang seharusnya menerima informasi rawan bencana	436.517		
1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2.250	0,515	BPBD
		Jumlah sasaran yang seharusnya memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	436.517		
1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	10.121	100	BPBD
		Jumlah sasaran yang seharusnya memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	10.121		
1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat daerah + Jumlah layanan pemadaman di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah	209	99,523	BPBD

No.	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Pembilang/ Penyebut	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota	210		
1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	7,12	7,12	BPBD
- Sosial					
1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	93	100	Dinsos
		Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	93		
1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	5.326	100	Dinsos
		populasi korban bencana alam dan sosial yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota	5.326		
2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar					
- Tenaga Kerja					
2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	9	50	Disnakertrans
		Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota	18		

No.	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Pembilang/ Penyebut	Capaian Kinerja	Sumber Data
2.a.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	192	37,209	Disnakertrans
		Jumlah tenaga kerja keseluruhan	516		
2.a.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	60.370,56	46,192	Disnakertrans
		Jumlah tenaga kerja	130.693		
2.a.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	494	64,659	Disnakertrans
		Jumlah perusahaan	764		
2.a.5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	11.499	93,678	Disnakertrans
		Jumlah pencari kerja yang terdaftar	12.275		
- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
2.g.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja belanja operasi dan modal APBD	891.860.962.890	26,209	DKBP3A
		Jumlah seluruh belanja belanja operasi dan modal di APBD	3.402.785.895.823		
2.g.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Jumlah anak (penduduk usia kurang 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi	63	100	DKBP3A
		Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten (penduduk usia kurang 18 tahun)	63		

No.	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Pembilang/ Penyebut	Capaian Kinerja	Sumber Data
2.g.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	13	1,531	DKBP3A
		Jumlah penduduk perempuan	848.914		
- Pangan					
2.h.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan	393,17756	62,807	Disnakertrans
		Jumlah kebutuhan pangan	626		
- Pertanian					
2.i.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	71.318.622	100	DPMPTSP
		seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	71.318.622		
2.i.2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	244.157	100	Bag. Perenc. Dan Keuangan Setda
		Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	244.157		
2.i.3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	71.318.622	100	DPMPTSP
		Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	71.318.622		
2.i.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari	Jumlah penerima tanah obyek <i>landreform</i> dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha	0	0 Surat Keterangan	DPMPTSP

No.	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Pembilang/ Penyebut	Capaian Kinerja	Sumber Data
	Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform	1		
2.i.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah	43.971.740	100	DPMPTSP
		luas izin membuka tanah yang diterbitkan	43.971.740		
2.i.6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	7	100	Bag. Hukum Setda
		Jumlah pengaduan sengketa tana garapan	7		
- Lingkungan Hidup					
2.j.1	IKLH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	64,389	64.389	DLH
2.j.2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kabupaten/ kota	Total volume sampah yang dapat ditangani	424.695,9	34,871	DLH
		Total volume timbunan sampah kabupaten/kota	1.217.903,07		
2.j.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kabupaten/kota	21	29,166	DLH
		usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	72		
- Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
2.k.1.1	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman	1.222.822	99,413	Disdukcapil
		Jumlah penduduk wajib KTP-el	1.230.033		

No.	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Pembilang/ Penyebut	Capaian Kinerja	Sumber Data
2.k.1.2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	234.026	46,686	Disdukcapil
		Jumlah anak usia 0-17 tahun	501.271		
2.k.1.3	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir	488.788	94,610	Disdukcapil
		Jumlah anak usia 0-18 tahun	516.630		
2.k.1.4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	19	63,333	Disdukcapil
		Jumlah OPD	30		
- Pemberdayaan masyarakat dan desa					
2.l.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	1	25	DPMD
		Jumlah desa tertinggal (per awal tahun-n)	4		
2.l.2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	245	96,456	DPMD
		Jumlah desa berkembang (per awal tahun-n)	254		
- Pengendalian penduduk dan keluarga berencana					
2.m.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur	2		DKBP3A
2.m.2		Jumlah peserta KB aktif modern	202.824	72,328	DKBP3A

No.	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Pembilang/ Penyebut	Capaian Kinerja	Sumber Data
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah pasangan usia subur	280.419		
2.m.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	29.662	10,577	DKBP3A
		Jumlah Pasangan Usia Subur	280.419		
- Perhubungan					
2.n.1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	0.639	0.639	Dishub
2.n.2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C Ratio di Jalan Kabupaten /Kota	0,25	0,25	Dishub
- Komunikasi dan Informatika					
2.o.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	58	100	Diskominfo
		Jumlah OPD	58		
2.o.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi	21	100	Diskominfo
		Jumlah layanan publik	21		
2.o.3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	1.125.146	100	Diskominfo
		Jumlah penduduk	1.125.146		
- Koperasi, usaha kecil dan menengah					

No.	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Pembilang/ Penyebut	Capaian Kinerja	Sumber Data
2.p.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	669	100	Diskoumperindag
		Jumlah seluruh koperasi	669		
2.p.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	2.009	4,141	Diskoumperindag
		Jumlah usaha mikro keseluruhan	48.514		
- Penanaman Modal					
2.q	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	Jumlah investasi tahun n – jumlah investasi tahun n-1	3.575.179.784.997	53,236	DPMPTSP
		Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten	6.715.614.997.003		
- Kepemudaan dan Olahraga					
2.r.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota	132	0,031	Disporapar
		Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	420.877		
2.r.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	120	0,028	Disporapar
		Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	420.877		
2.r.3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	0	Surat Keterangan	Disporapar
- Statistik					
2.s.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	58	100	Diskominfosatik

No.	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Pembilang/ Penyebut	Capaian Kinerja	Sumber Data
	perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD	58		
2.s.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	58	100	DiskominfoSatik
		Jumlah OPD	58		
- Persandian					
2.t	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi	0	Surat Keterangan	DiskominfoSatik
		Jumlah area penilaian	1		
2.u	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	38	100	Disdikbud
		Jumlah cagar budaya yang terdata	38		
2.v.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	0	Surat Keterangan	DPKD
2.v.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)	47,83	47,83	DPKD
- Kearsipan					
2.w.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Tingkat ketersediaan arsip $T = (a+i+s+j)/4$	50,045	50,045	DPKD

No.	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Pembilang/ Penyebut	Capaian Kinerja	Sumber Data
2.w.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip $T = (m+b+g+a+c+i)/6$	100	100	DPKD
3. Urusan Pilihan					
- Kelautan dan Perikanan					
3.a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota Target Produksi Perikanan Mengacu Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	65.930,19 42.419,27	155,425	Dinas Perikanan
- Pariwisata					
3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan mancanegara tahun (n) - Jumlah wisatawan mancanegara tahun (n-1) Jumlah wisatawan mancanegara tahun (n-1)	6.323 13.550	46,664	Disporapar
3.b.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Jumlah wisatawan nusantara tahun (n) - Jumlah wisatawan nusantara tahun (n-1) Jumlah wisatawan nusantara tahun (n-1)	362.806 2.164.415	16,762	Disporapar
3.b.3	Tingkat Hunian Akomodasi	Jumlah kamar yang terjual Jumlah kamar yang tersedia	288.240 801.540	35,960	Disporapar
3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Jumlah Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1.985,08	2,256	Disporapar

No.	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Pembilang/ Penyebut	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Total PBRB harga berlaku	87.983,13		
3.b.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Jumlah Pendapatan dari sektor pariwisata	40.534.393.229	1,250	Disporapar
		Jumlah total PAD	3.240.612.481.740		
3.c.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun	561.197	579,001	DKPP
		luas panen	96.925		
3.c.2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	-534	-20,562	DKPP
		Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	2.597		
3.d					
3.e	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin	0	0 Surat Keterangan	DPMPTSP
		Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	1		
- Perdagangan					
3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	420	97.222	Diskoumperindag
		Jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten/kota	432		
3.f.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi pupuk	20.103	60,739	Diskoumperindag
		Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)	33.097		

No.	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Pembilang/ Penyebut	Capaian Kinerja	Sumber Data
3.f.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan	2.222.111	100	Diskoumperindag
		Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota	2.222.111		
- Perindustrian					
3.g.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Jumlah Industri kecil dan menengah tahun 2021	484	1,007	Diskoumperindag
		Jumlah Industri kecil dan menengah tahun 2022	48.053		
3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0	0 Surat ket.	Diskoumperindag
3.g.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	2	100	Diskoumperindag
		Jumlah izin yang dikeluarkan	2		
3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	2	100	Diskoumperindag
		Jumlah izin yang dikeluarkan	2		
3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	1	100	Diskoumperindag

No.	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Pembilang/ Penyebut	Capaian Kinerja	Sumber Data
	Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang dikeluarkan	1		
3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100	100	Diskoumperindag

2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Pembilang/ Penyebut	Capaian Kinerja	Sumber Data
- Perencanaan dan Keuangan					
4.a.1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	380.508.891.502	11,593	BPKAD
		Jumlah APBD	3.282.084.705.499		
4.a.2	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah PAD	878.927.795.941	27,047	BPKAD
		Jumlah Pendapatan pada APBD	3.249.599.477.630		
4.a.3	Mauritas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	3	3	Inspektorat
4.a.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kapabilitas APIP	3	3	Inspektorat
4.a.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Total Belanja Urusan Pemerintahan - transfer expenditures	2.270.209.497.575	69,169	BPKAD
		Total belanja APBD	3.282.084.705.499		
4.a.5	Opini Laporan Keuangan	Opini BPK atas Laporan Keuangan 10 Tahun Terakhir	10	10	BPKAD

No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Pembilang/ Penyebut	Capaian Kinerja	Sumber Data
- Pengadaan					
4.b.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2021	0	0 Surat Keterangan	DPUPR
		Jumlah kontrak keseluruhan tahun 2021	1		
4.b.2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	4.286	77,072	Bag. ULP Setda
		Jumlah keseluruhan pengadaan baik yang dilakukan dengan metode kompetitif maupun tanpa metode kompetitif	5.561		
4.b.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan	588.179.070.183	21,109	. BBPKAD
		Total belanja operasi dan modal	2.786.373.382.632		
4.b.4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)	157.905.228.231	34,902	Bag. ULP Setda
		Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)	452.418.861.781		
- Kepegawaian					
4.c.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak	Jumlah pegawai menurut pendidikan Perguruan Tinggi ke atas	1.982	74,010	BKPSDM

No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Pembilang/ Penyebut	Capaian Kinerja	Sumber Data
	termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	2.678		
4.c.2	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	493	18,409	BKPSDM
		Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	2.678		
4.c.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	30	6,085	BKPSDM
		Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	493		
- Manajemen Keuangan					
4.d.1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Total belanja dalam realisasi	3.282.084.705.499	7,597	BPKAD
		Total belanja APBD	3.551.958.313.223		
4.d.2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Total PAD dalam realisasi	878.927.795.941	17,204	BPKAD
		Total PAD dalam APBD	1.061.558.897.765		
4.d.3	Assets Management	Total Assets Management	4	4	BPKAD
4.d.4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA	32.917.792.882	1,083	BPKAD
		Total belanja anggaran tahun sebelumnya	3.037.809.864.193		
- Transparansi dan Partisipasi Publik					
4.e.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda	3.444.034.549	88,336	Diskominfosatik

No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Rumus	Pembilang/ Penyebut	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda	3.898.759.428		
4.e.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda	9	100	DiskominfoSatik
		Total jumlah dokumen yang telah dirinci	9		

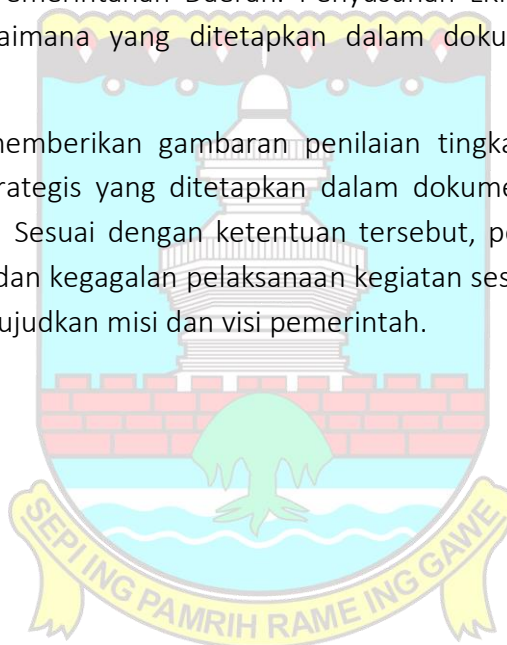


2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Pemerintah Kabupaten Serang selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Serang melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Serang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penyusunan LKIP Tahun 2023 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 maupun RKPD Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.



2.3.1. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN SERANGTAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hj. RATU TATU CHASANA,SE,M,Ak

Jabatan: BUPATI SERANG

Berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Serang, 03 Januari 2023

BUPATI SERANG

Hj.RATU TATU CHASANA,SE,M,Ak

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
		Angka Rata – Rata Lama Sekolah	7,93	
		Angka Rata – Rata Harapan Bersekolah	13,12	
1	Meningkatnya akses, kualitas dan management pelayanan bidang pendidikan	Angka Pendidikan Dasar yang ditamatkan	49,31	
		Tingkat Warisan Budaya yang Dilestarikan	58.62%	
2	Meningkatnya kearifan dankelestarian seni budaya lokal serta daya dukung generasi muda bagi daerah	Cakupan warisan budaya skala kabupaten dan nasional	58.62%	
		Angka Harapan Hidup (AHH)	65.26%	
3	Meningkatkan akses masyarakat terhadap kesehatan yang berkualitas dan Layanan kesehatan yang bermutu merata dan Terjangkau bagiSeluruh Masyarakat	1	Angka kematian ibu	194
		2	Angka kematian bayi	8.23
		3	Angka Prevelensi Stunting	16%
		4	Persentase fasyankes yg terstandar dan terakreditasi	35
		5	Presentase Pemenuhan Standar AkreditasiRumah Sakit	80%
		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur		
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kawasan dan daerah serta aksesibilitas antar wilayah	1	Cakupan aksesibilitas antar wilayah	100%
		2	Persentase Desa yang telah mendapatkan pelayanan air minum	88,34
		3	Persentase Desa yang telah mendapatkanlayanan pengolahan air limbah domestik	72,7
		4	Persentase jumlah bangunan gedung daerah dengan kondisi baik	65
		5	Persentase kawasan kumuh	0.16
		6	Tingkat Pembinaan Badan Usaha Konstruksi	48,33
		7	Persentase Drainase Kota dengan kondisibaik	55,56%
		8	Proporsi Panjang jaringan jalan kabupatendalam kondisi baik	64.9
		9	Tingkat Pemanfaatan Informasi Tata Ruangdalam pembangunan	100
		10	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	20
		11	Cakupan ketersediaan air baku	100%
5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya alam	1	Indeks kualitas Air	50.75
		2	Indeks Kualitas udara	83.00
		3	Indeks tutupan Vegetasi	69.995
		4	Persentase Penanganan Sampah	19.85
		5	Persentase Rumah Layak Huni	90.49%
		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	2,42	
		Inflasi	1.5	
		Tingkat Pengangguran Terbuka	11.55	
6	Meningkatnyaproduktivitas, ketahanan, dan peran ekonomi sektor pertanian dalam arti luas	1	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	2.84

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
		2	Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan	1.48
7	Meningkatnya kapasitas KUMKM yang sinergi dengan dunia usaha perdagangan dan industri	1	Proporsi peningkatan SHU koperasi	2%
		2	Pertumbuhan Wirausaha Baru	10
		3	Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	0.70
		4	Pertumbuhan sektor industri dalam PDRB	3.22
8	Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan Nilai Investasi daerah: PMA PMDN		3% 3%
9	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian daerah	Kontribusi PAD Pariwisata		17.020.000.000
10	Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa	Prosentase Desa Maju dan Mandiri didasarkan dari IDM		16.87
11	Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan		25
		Persentase Tingkat Kemiskinan		4.18
		Indeks Gini Rasio		0.276
12	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan		77.20%
13	Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan sosial serta pengendalian penduduk	1	Prosentase PMKS yang mendapatkan program pelayanan sosial	3%
		2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,1
		3	Persentase penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak serta trafficking	65
		4	Total Fertility Rate	2,24
		Indeks Reformasi Birokrasi		B
14	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	1	Opini BPK	WTP
		2	Nilai LPPD	4.20
		3	Nilai SAKIP	BB
		4	Jumlah OPD pelayanan melaksanakan Zona integritas (ZI) WBBM WBK	1
15	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Maturitas SPIP		3,6
16	Meningkatnya Pendapatan asli Daerah	Tingkat Pertumbuhan PAD		3.28%
17	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berbasis data, penelitian, dan pengembangan inovasi	1	Nilai konsistensi perencanaan pembangunan daerah	100
		2	Nilai capaian kinerja kegiatan perangkat daerah	100
		3	Indeks Inovasi Daerah	inovatif
		4	Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan	70,00%
18	Meningkatnya kualitas SDM aparatur	1	Tingkat Capaian kinerja pegawai kategori baik	93%
		2	Cakupan standar kompetensi pegawai	95.00%
19	Meningkatnya keterbukaan informasi publik yang didukung kemajuan TI	1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID)	75%
		2	Indeks Kematangan Penerapan SPBE	2.98
		3	Indeks Keamanan informasi (Indeks KAMI)	140
20	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
	yang didukung kemajuan TI	2	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara digital	62.50%
		3	Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk	87,4
		4	Indeks Risiko Bencana	203
		5	Persentase penurunan jumlah pelanggaran Trantibum dan Perda	5%
			Indeks Kerukunan Umat Beragama	87.95
21	Meningkatnya toleransi kehidupan umat beragama	Tingkat kejadian SARA di tengah tengah masyarakat		0

NO	PROGRAM	ANGGARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 768.059.098.226
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp. 337.323.293.300
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rp. 13.968.500
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp. 19.141.400.000
5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Rp. 15.000.000
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rp. 651.418.000
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Rp. 95.000.000
8	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Rp. 73.582.000
9	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Rp. 220.000.000
DINAS KESEHATAN		
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 170.532.401.482
12	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp. 100.622.244.332
13	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp. 14.777.641.912
14	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp. 352.153.000
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp. 7.266.837.000
RUMAH SAKIT dr. DRADJAT PRAWIRANEGARA		
16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 239,357,593,478
17	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp. 8.00.000.000
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 34.801.438.996
19	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp. 166.285.330.000
20	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp. 16.065.600.769
21	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Rp. 28.678.000.000
22	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp. 8.365.819.727
23	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp. 4.338.891.500
20	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp. 47.787.875.325
21	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rp. 2.844.444.632
22	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp. 172.949.348.946
23	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp. 2.325.636.685
24	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp. 4.350.000.000
25	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Rp. 100.000.000
26	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Rp. 150.000.000
27	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Rp. 2.400.000.000
DINAS PERUAMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
28	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 7.547.044.831

NO	PROGRAM	ANGGARAN
29	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp. 705.000.000
30	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp. 4.058.063.916
31	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rp. 9.058.500.000
32	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp. 3.150.658.400
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
33	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 11.728.639.704
34	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 2.836.760.296
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
35	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 10.197.320.789
36	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp. 2.143.747.818
37	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN	Rp. 2.595.844.703
	KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
DINAS SOSIAL		
38	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 8.159.254.380
39	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp. 1.107.740.152
40	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAKKEKERASAN	Rp. 10.000.000
41	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp. 287.006.952
42	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp. 1.067.039.336
43	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp. 1.189.699.700
44	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp. 68.558.200
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
45	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 9.150.213.210
46	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Rp. 135.200.000
47	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp. 1.160.500.000
48	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp. 492.000.000
49	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp. 365.000.000
50	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Rp. 170.000.000
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		
51	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp. 719.794.160
52	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rp. 59.999.800
53	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 25.838.061.459
54	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp. 11.789.648.363
55	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp. 200.441.522
56	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rp. 370.575.000
57	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rp. 220.000.000
58	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp. 353.500.000
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
59	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 13.520.945.957
60	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp. 178.727.730
61	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp. 630.953.536
62	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rp. 175.793.300
63	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Rp. 15.800.000
64	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Rp. 167.296.903
65	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp. 108.280.000
66	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp. 99.908.000
67	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp. 76.493.000
68	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp. 14.923.921.284

NO	PROGRAM	ANGGARAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PECAKATAN SIPIL		
69	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 17.432.064.610
70	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp. 135.815.000
71	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp. 141.595.000
72	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp. 232.711.800
73	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Rp. 15.606.000
DINAS PEMBERDAYAAN DAN DESA		
74	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 7.544.506.800
75	PROGRAM PENATAAN DESA	Rp. 7.871.500.000
76	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Rp. 19.238.000
77	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp. 502.599.722.484
78	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp. 2.122.812.700
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
79	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp. 419.860.000
80	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp. 51.870.000
81	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rp. 57.254.900
82	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rp. 5.460.000
83	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp. 87.319.800
84	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp. 278.839.977
85	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 9.264.715.473
86	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp. 560.783.000
87	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp. 11.402.893.000
88	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp. 8.766.557.900
DINAS PERHUBUNGAN		
89	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 14.388.850.216
90	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp. 24.554.629.201
91	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rp. 983.320.520
92	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Rp. 87.000.000
93	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Rp. 583.331.364
DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
94	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 7.292.472.524
95	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp. 3.220.459.428
96	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp. 4.417.756.384
97	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp. 364.453.700
98	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp. 290.042.968
DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
99	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 10.978.675.752
100	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Rp. 40.000.000
101	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp. 29.741.000
102	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Rp. 30.259.000
103	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Rp. 210.185.000
104	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rp. 220.000.000
105	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp. 370.184.884
106	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp. 1.267.996.700
107	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp. 10.000.000
108	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp. 937.000.000
109	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp. 388.510.000
110	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Rp. 119.866.884
111	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp. 160.000.000

NO	PROGRAM	ANGGARAN
112	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Rp. 399.977.400
113	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp.785,000,000
114	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Rp.35,000,000
115	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Rp.40,000,000
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
116	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 10.245.946.642
117	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp. 65.047.000
118	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp. 104.819.400
119	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp. 153.300.000
120	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp. 52.607.100
121	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp. 403.430.200
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
122	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 5.813.833.900
123	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp. 478.580.700
124	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rp. 4.450.000.000
125	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Rp.375,000,000
126	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp. 701.182.000
127	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rp. 962.642.200
128	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Rp. 106.700.000
129	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp. 149.117.700
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
130	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 5.979.673.300
131	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rp. 540.518.065
132	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Rp. 164.307.870
133	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Rp. 28.491.980
DINAS PERIKANAN		
134	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 9.278.426.062
135	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp. 1.526.529.396
136	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp. 8.448.359.955
137	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp. 804.113.668
SEKRETARIAT DAERAH		
138	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 62.690.031.580
139	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp. 13.077.377.484
140	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp. 3.759.037.508
SEKRETARIAT DPRD		
141	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 57.607.812.364
142	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp. 39.018.941.892
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
143	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 11.714.943.795
144	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 1.551.007.800
145	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 1.963.625.000
146	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp. 855.759.800
BADAN PENDAPATAN DAERAH		
147	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 39.938.070.760
148	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp. 5.110.729.240
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
149	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 49.451.737.295
150	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp.12.745.046.736

NO	PROGRAM	ANGGARAN
151	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp. 3.250.560.620
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
152	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 8.049.427.427
153	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp. 1.852.965.500
154	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp. 1.198.850.200
INSPEKTORAT DAERAH		
156	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 19.733.729.950
157	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp. 2.825.056.000
158	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp. 718.345.300
KECAMATAN ANYER		
159	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 3192.979.952
160	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 1.229.078.148
161	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 10.157.500
162	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 34.713.400
163	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 192.128.200
164	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 165.228.800
KECAMATAN BANDUNG		
165	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 2.898.443.300
166	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 193.704.800
167	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 107.151.200
168	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 140.230.700
169	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 95.770.000
KECAMATAN BAROS		
170	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 3.466.933.376
171	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 1.240.055.724
172	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 86.780.800
173	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 17.812.600
174	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 176.568.900
175	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 78.148.600
KECAMATAN BINUANG		
176	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 2.680.194.700
177	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 145.370.600
178	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 76.215.300
179	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 18.509.200
180	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 110.810.200
181	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 100.000.000
KECAMATAN BOJONEGARA		
182	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 3.026.859.000
183	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 164.070.200
184	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 35.319.700
185	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 58.796.800
186	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 198.433.700
187	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 110.020.600
KECAMATAN CARENANG		
188	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 2.870.337.500
189	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 241.138.600
190	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 13.609.300
191	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 24.972.700
192	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 192.541.900
193	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 100.000.000
KECAMATAN CIKANDE		
222	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 3.591.811.500
223	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 1.365.374.800

NO	PROGRAM	ANGGARAN
224	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 90.760.900
225	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 19.846.000
226	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 196.706.800
227	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 100.000.000
KECAMATAN CIKEUSAL		
228	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp. 3.362.201.900
229	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 227.530.800
230	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 123.978.600
231	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 7.398.300
232	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 166.290.400
233	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 65.300.000
KECAMATAN CINANGKA		
234	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 2.993.075.290
235	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 946.693.496
236	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 124.810.400
237	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 36.400.200
238	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 97.630.000
KECAMATAN CIOMAS		
239	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.3,439,399,859
240	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.1,050,862,904
241	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.177,175,612
242	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.59,155,304
243	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp.236,777,608
244	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.111,745,304
KECAMATAN CIRUAS		
245	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.4,424,955,652
246	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.1,350,710,000
247	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.148,584,000
248	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.17,357,428
249	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp.212,447,600
250	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.100,000,000
KECAMATAN GUNUNGSARI		
251	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.3,160,925,680
252	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.60,000,000
253	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.150,000,000
254	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.8,000,000
255	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp.170,000,000
256	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.110,000,000
KECAMATAN JAWILAN		
257	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.3,280,923,526
258	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.108,917,258
259	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.97,133,258
260	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.17,991,629
261	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp.117,438,258
262	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.107,541,635
KECAMATAN KIBIN		
263	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.3,871,798,854
264	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.1,588,266,000
265	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.80,716,400
266	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp.86,286,000
267	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.100,000,000
KECAMATAN KOPO		
268	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.3,214,286,672
269	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.77,754,526

NO	PROGRAM	ANGGARAN
270	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.130,254,526
271	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.18,127,263
272	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp.154,754,526
273	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.108,127,267
KECAMATAN KRAGILAN		
274	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA	Rp.4,344,930,462
275	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.1,300,000,000
276	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.173,000,000
277	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp.130,000,000
278	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.117,270,912
KECAMATAN KRAMATWATU		
279	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA	Rp.4,035,000,819
280	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.1,378,592,576
281	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.164,283,220
282	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.9,500,000
283	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp.122,435,000
284	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.200,000,200
KECAMATAN LEBAK WANGI		
285	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA	Rp.3,322,804,352
286	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.265,396,714
287	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.104,092,307
288	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.148,092,307
KECAMATAN MANCAK		
289	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA	Rp.3,218,954,180
290	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.112,540,000
291	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.75,000,000
292	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.10,280,000
293	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp.127,781,500
294	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.124,190,000
KECAMATAN PABUARAN		
295	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA	Rp.3,240,265,645
296	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.1,142,333,333
297	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.120,000,000
298	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.22,333,333
299	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp.172,333,334
300	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.100,000,000
KECAMATAN PADARINCANG		
301	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA	Rp.3,136,077,780
302	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.1,259,960,000
303	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.158,307,000
304	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.10,491,000
305	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp.155,229,900
306	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.100,000,000
KECAMATAN PAMARAYAN		
307	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA	Rp.3,320,010,343
308	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.185,997,000
309	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.63,535,000
310	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.30,662,000
311	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp.110,661,500
312	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.100,000,000
KECAMATAN PETIR		
313	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA	Rp.3,090,371,048
314	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.122,955,000
315	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.113,701,000

NO	PROGRAM	ANGGARAN
316	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.14,440,000
317	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp.156,570,000
318	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.116,693,334
KECAMATAN PONTANG		
319	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.3,314,574,901
320	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.1,218,905,533
321	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.90,350,000
322	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.8,640,000
323	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp.170,815,000
324	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.160,000,000
KECAMATAN PULO AMPEL		
325	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.3,289,151,700
326	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.151,830,000
327	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.103,434,000
328	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.13,670,000
329	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp.165,760,000
330	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.94,860,000
KECAMATAN TANARA		
331	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.3,132,615,680
332	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.1,188,750,000
333	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.107,400,000
334	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.26,750,000
335	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp.224,500,000
336	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.112,750,000
KECAMATAN TIRTAYASA		
337	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.3,621,745,840
338	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.1,093,800,000
339	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.122,500,000
340	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.27,300,000
341	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp.195,700,000
342	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.100,000,000
KECAMATAN TUNJUNG TEJA		
343	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.2,904,205,680
344	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.167,000,000
345	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.206,000,000
346	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.53,000,000
347	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp.150,000,000
348	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.100,000,000
KECAMATAN WARINGINKURUNG		
349	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.3,234,460,574
350	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.977,500,000
351	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.160,665,470
352	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.45,509,470
353	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp.147,511,000
354	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.100,000,000
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
355	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.7,291,503,690
356	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTERKEBANGSAAN	Rp.733,334,300
357	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKASERTA BUDAYA POLITIK	Rp.1,493,625,700
358	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp.432,600,000

NO	PROGRAM	ANGGARAN
359	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Rp.500,000,000
360	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATANKUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp.983,332,500
		Rp.2,681,280,094,712

Serang, 03 Januari 2023

BUPATISERANG

CH

Hj.RATUTATUCHASANA,SE,M,Ak



2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja

MISI 1 : Meningkatkan Perluasan Dan Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan Dan Layanan Pendidikan Yang Bermutu Disetiap Jalur Dan Jenjang Pendidikan Serta Melestarikan Dan Mengembangkan Tradisi Budaya Sebagai Kearifan Lokal Yang Tumbuh Dan Hidup Ditengah Masyarakat

Sasaran 1:

Hasil pengukuran capaian kinerja misi 1 sasaran 1 yaitu *Meningkatnya Aksesibilitas, Kualitas dan Manajemen Pendidikan*, sebagai berikut:

Tabel 8 Evaluasi Kinerja Misi 1 Sasaran 1

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		CAPKIN 2023 (%)	CAPKIN 2022 (%)	CAPKIN 2023 - 2022 (%)	TARGET RPJMD 2023	CAPKIN 2023 : RPJMD (%)
			TARGET 2023	REALISASI 2023					
1	Angka Pendidikan Dasar Yang Ditamatkan	Poin	49,31	49,98	101,36	101,25	1,11	48.72	101,36
JUMLAH					101,36	101,25	1,11	48.72	101,36
RATA RATA CAPAIAN SASARAN					101,36	101,25	1,11	48.72	101,36

Sumber: *LKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2023*

Hasil analisis capaian kinerja sasaran *Meningkatnya Aksesibilitas, Kualitas dan Manajemen Pendidikan* dengan 1 (Satu) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar **101,36 %** dengan kategori *Baik Sekali*

Sasaran tersebut dicapai program dan kegiatan antara lain yaitu:

- 1) PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
 - a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;
 - b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - d. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
- 2) PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
 - a. Penetapan kurikulum muatan local dasar
- 3) PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
 - a. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi, Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- 4) PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
 - a. Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Permasalahan

Dari serangkaian program yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- 1) Insentif Tenaga Administrasi Lainnya untuk 96 Orang Triwulan IV tidak dapat dibayarkan di tahun 2023 dikarenakan tidak tersedianya anggaran;

Solusi

- 1) Anggaran Insentif Administrasi Lainnya untuk 96 Orang diluncurkan di tahun 2024;

Pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan angka rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2022 mengalami **Kenaikan** yaitu sebesar **0,11 %**

Sasaran 2 :

Hasil pengukuran capaian kinerja misi 1 sasaran 2 yaitu **Meningkatnya Kearifan Dan Kelestarian Seni Budaya Lokal Serta Daya Dukung Generasi Muda Bagi Daerah**, sebagai berikut:

Tabel 9 Evaluasi Kinerja Misi 1 Sasaran 2

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		CAPKIN 2023 (%)	CAPKIN 2022 (%)	CAPKIN 2023 - 2022 (%)	TARGET RPJMD 2023	CAPKIN 2023 : RPJMD (%)
			TARGET 2023	REALISASI 2023					
1	Cakupan Warisan Budaya Skala Kabupaten dan Nasional	%	58,62	60	102,35	103,56	-1,21	58,62	102,35
JUMLAH					102,35	103,56	-1,21	58,62	102,35
RATA RATA CAPAIAN SASARAN					102,35	103,56	-1,21	58,62	102,35

Hasil analisis capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Kearifan Dan Kelestarian Seni Budaya Lokal Serta Daya Dukung Generasi Muda Bagi Daerah** dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar **102,53%** dengan kategori **Baik Sekali**

Sasaran tersebut dicapai program dan kegiatan antara lain yaitu :

- 1) PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
 - a. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
 - a. Pembinaan Kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota
- 3) PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
 - a. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 4) PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
 - b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota

Permasalahan

Dari serangkaian program yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- 1) Tidak terdapat masalah pada indikator ini karena dapat tercapai dan melebihi target yang ditetapkan hanya rata-rata capaian menurun dari tahun lalu.

Solusi

- 1) Dikarenakan masih terbatasnya anggaran pada sub kegiatan di bidang kebudayaan, maka sub kegiatan tersebut dapat dilaksanakan melalui kegiatan masing-masing sanggar seni/budaya atau bersifat non budgeter.

Pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan angka rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2022 mengalami **Penurunan** yaitu sebesar **1,21 %**

Keterangan

1. LKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2023

MISI 2 : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu, Merata Dan Terjangkau Yang Didukung Oleh Tenaga Kesehatan Yang Profesional

Sasaran 1 :

Hasil pengukuran capaian kinerja misi 2 sasaran 1 yaitu *Meningkatnya Aksesibilitas Dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat*, sebagai berikut:

Tabel 10 Evaluasi Kinerja Misi 2 Sasaran 1

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		CAPKIN 2023 (%)	CAPKIN 2022 (%)	CAPKIN 2023 - 2022 (%)	TARGET RPJMD 2023	CAPKIN 2023 : RPJMD (%)
			TARGET 2023	REALISASI 2023					
1	Angka Kematian Ibu Persentase	Orang	194	93,88	206	114	92	194	206
2	Angka Kematian Bayi	%	8,23	6,7	214	121	93	8,23	214
3	Angka Prevelensi Stunting	%	16	5,66	282	205	77	16	282
4	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Terstandar dan Terakreditasi	%	35	37,4	106	113	-7	35	37,4
5	Presentase Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit	%	80	80	80	80	80	80	80
JUMLAH					888	653	355	333,23	819,40
RATA RATA CAPAIAN SASARAN					177,60	126,60	67	66,65	163,88

Sumber : LKIP Dinas Kesehatan th 2023 & RSDP Th 2023

Hasil analisis capaian kinerja sasaran *Meningkatnya Aksesibilitas Dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat* dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar **177,60%** dengan kategori *Baik Sekali*

Sasaran tersebut dicapai program dan kegiatan antara lain yaitu :

- 1) PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
 - a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah.
- 2) PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
 - a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber;
 - c. Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota;
 - d. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

- 3) PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
 - a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
 - b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga;
 - c. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.
- 4) PROGRAM PEMBERDAYAAN PEMENUHAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
 - a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pelaksanaan Sehat dalam rangka promotif Preventif Penyediaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Permasalahan

Dari serangkaian program yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- 1) Pada tahun anggaran 2023 untuk pengembangan Puskesmas Pabuaran baru sampai pada tahapan Persiapan; tahun anggaran 2024 masuk tahapan perencanaan; dan tahun anggaran 2025 akan dilanjutkan pada tahapan pembangunan konstruksi;
- 2) Anggaran terfokus dari Dana DAK Fisik bidang kesehatan sedang dari APBD tidak ada Anggaran;
- 3) Keterlambatan diterimanya LPLPO di UPT Gudang Farmasi, sehingga pelayanan tidak sesuai dengan jadwal;
- 4) Kurangnya pemerataan SDM khususnya pada tim KIBLA serta pembiayaan dalam pemenuhan sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan kesehatan ibu hamil;
- 5) Kurangnya pemerataan SDM khususnya pada tim KIBLA serta pembiayaan dalam pemenuhan sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan kesehatan ibu hamil;
- 6) Kurangnya pemerataan SDM khususnya pada tim KIBLA serta pembiayaan dalam pemenuhan sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- 7) Kurangnya pemerataan SDM khususnya pada tim KIBLA serta pembiayaan dalam pemenuhan sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan kesehatan balita;
- 8) Kurangnya pembiayaan dalam pemenuhan sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan kesehatan anak usia dasar;
- 9) Masih kurang SDM terlatih dalam Pelayanan Usia Produktif, baik tenaga kesehatan dan Non Kesehatan (Petugas Kesehatan dan Kader Posbindu PTM);
- 10) Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Usia Produktif dalam Skrining 9 Penyakit Prioritas;
- 11) Belum maksimal peran Lintas Program dan Lintas Sektor Terkait dalam Pelayanan Kesehatan Usia Produktif;
- 12) Kurangnya Dukungan Fasilitas Kesehatan Swasta (Klinik dan RS) dalam pelayanan Kesehatan Usia Produktif kegiatan dan Pencatatan Pelaporan;
- 13) Belum Tepat waktu Pencatatan dan Pelaporan Real Time di Aplikasi SI-PTM dan ASIK SKrining PTM;
- 14) Kurangnya pembiayaan dalam pemenuhan sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan kesehatan usia lanjut;
- 15) Masih Kurangnya Pengetahuan Petugas Puskesmas dalam Penatalaksanaan Penderita Hipertensi;
- 16) Masih kurangnya Peran Lintas Program dan Jejaring (Faskes Swasta) dalam Temuan Kasus Hipertensi;
- 17) Belum tepat waktu Pencatatan dan Pelaporan Kasus Hipertensi baik di Puskesmas dan Faskes Swasta;

- 18) Masih Kurangnya Pengetahuan Petugas Puskesmas dalam Penatalaksanaan Penderita Diabetes Melitus;
- 19) Masih kurangnya Peran Lintas Program dan Jejaring (Faskes Swasta) dalam Temuan Kasus Diabetes Melitus;
- 20) Belum tepat waktu Pencatatan dan Pelaporan Kasus Diabetes Melitus baik di Puskesmas dan Faskes Swasta;
- 21) Kurangnya SDM;
- 22) Masih banyaknya SDM yang blm di latih;
- 23) Belum adanya RSJ rujukan;
- 24) Belum adanya lembaga pemberdayaan ODG;
- 25) Masih kurangnya Pengetahuan Petugas Puskesmas dalam temuan Kasus Terduga TB;
- 26) Belum maksimal Peran Fasilitas Kesehatan Swasta (Klinik dan Rumah Sakit) dalam temuan kasus Terduga TB;
- 27) Belum tepat waktu pencatatan dan Pelaporan melalui SITB;
- 28) Masih kurangnya Pengetahuan Petugas dalam melakukan Skrining Populasi Berisiko HIV;
- 29) Belum maksimal Peran Fasilitas Kesehatan Swasta (Klinik dan Rumah Sakit) dalam melakukan Skrining Populasi Berisiko HIV, dan Pencatatan Pelaporan di SI-HA;
- 30) Belum seluruh puskesmas memiliki tenaga sanitasi lingkungan/sanitarian. Kurangnya koordinasi lintas program antara tenaga sanitasi lingkungan dengan pemegang program lainnya. Tidak adanya pendanaan untuk pendataan data dasar kesling. Kurangnya dana untuk Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan juga pembinaan. Belum seluruh Puskesmas memiliki sanitarian Kit;
- 31) Kurangnya SDM khusus Promkes, Pemegang program baru belum memahami kualitas program;
- 32) Pengelolaan Kegiatan Surveilans Masih terbatas pada Kuantitas Pelaporan, belum sepenuhnya diikuti dengan Kualitas Pelaporan;
- 33) Banyak aplikasi, Data belum sinkron di aplikasi Simkeswa, Link dari pusat belum terintegrasi dengan aplikasi, Kurangnya SDM yang kurang paham aplikasi, banyaknya aplikasi pelaporan;
- 34) Belum Semua Wilayah Puskesmas Mempunyai Pemetaan Risiko Daerah Potensi Bencana, Penduduk Rentan dan Berisiko Terdampak Bencana;
- 35) Masih kurangnya SDM terlatih Program Penyakit Menular dan Tidak Menular (P2BB, KUSTA, ISPA, DIARE, HEPATITIS, KANKER) dalam penatalaksanaan Kasus;
- 36) Belum terpenuhinya sarana Prasarana dalam Penanganan Kasus Penyakit menular dan Tidak menular;
- 37) Belum Tepat waktu Pencatatan dan Pelaporan Penyakit Menular dan Tidak Menular;
- 38) Masih banyaknya warga kabupaten Serang yang belum memiliki Jaminan Kesehatan;
- 39) Minimnya Akses Informasi tentang Jaminan Kesehatan di masyarakat;
- 40) Pengetahuan masyarakat yang kurang memahami Jaminan kesehatan;
- 41) Anggaran Pemerintah Daerah yang masih terbatas;
- 42) Kesulitan input dlm aplikasi, karena aplikasi laporan dan aplikasi skrining berbeda. skrining aplikasi dengan menggunakan NIK, untuk sekolah sulit meminta NIK siswa, Kurangnya SDM yang paham aplikasi, karena banyaknya aplikasi;
- 43) Kesulitan dalam pengelolaan pelaporan penatausahaan BOK Puskesmas, Belum maksimalnya anggaran pendapatan beberapa PKM sehingga masih memerlukan Bantuan Operasional;
- 44) Sarana dan Prasarana masih belum lengkap, SDM, anggaran yang belum memenuhi kebutuhan;
- 45) Keterlibatan Unit Pelapor Masih Terbatas dilaksanakan oleh Faskes Pemerintah, Keterlibatan Faskes Swasta masih terbatas;
- 46) SPGDT di Kab. Serang perlu dioptimalkan lagi;
- 47) Masih kurangnya SDM terlatih dalam Pengelolaan Pasien TB;
- 48) Masih Kurangnya sarana dan prasarana dalam pengobatan Penderita TB;
- 49) Belum Maksimal Peran Pendamping Minum Obat di Keluarga dalam pencegahan Penularan Tuberkulosis;
- 50) Masih kurangnya SDM terlatih dalam Pengelolaan Pasien HIV;
- 51) Masih Kurangnya sarana dan prasarana dalam pengobatan Penderita HIV;

- 52) Belum Maksimal Peran Pendamping Minum Obat di Masyarakat dan Keluarga dalam Pencegahan Penularan HIV;
- 53) Melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pencatatan dan Pelaporan melalui SI-HA;
- 54) Penggunaan SISRUITE yang belum Optimal;
- 55) THL tidak memperpanjang kontrak karena bekerja di instansi yang lain, lolos PPPK di luar wilayah Kabupaten Serang;
- 56) Capaian strata posyandu masih banyak yang belum aktif;
- 57) Kegiatan GERMAS belum maksimal di lintas program.

Solusi

- 1) Dibutuhkan komitmen anggaran untuk menyelesaikan proses pembangunan pengembangan Puskesmas Pabuaran sampai dengan selesai tahapan konstruksi pembangunan gedung;
- 2) Penambahan Anggaran untuk memenuhi kebutuhan alat kesehatan di 31 PKM;
- 3) Penambahan Anggaran untuk tercapainya kebutuhan obat hingga 18 Bulan sesuai dengan RKO;
- 4) Koordinasi dengan Kasi Farmalkes, Pj.Program DinKes, dan Pengelola Obat Puskesmas;
- 5) Penambahan Biaya APBD dalam pemenuhan sarana dan prasarana dan penerimaan SDM Kesehatan di setiap puskesmas dan pustu;
- 6) Melakukan koordinasi terintegrasi dengan Dinas Pendidikan dan memenuhi sarana dan prasarana seperti buku rapor kesehatan di sekolah sekolah;
- 7) Peningkatan Kapasitas SDM terlatih dalam Pelayanan Usia Produktif, baik tenaga kesehatan dan Non Kesehatan (Petugas Kesehatan dan Kader Posbindu PTM);
- 8) Menyiapkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Usia Produktif dalam Skrining 9 Penyakit Prioritas;
- 9) Melakukan rapat koordinasi dengan Lintas Program dan Lintas Sektor Terkait dalam Pelayanan Kesehatan Usia Produktif;
- 10) Melakukan rapat koordinasi dengan Lintas Program dan Lintas Sektor Terkait dalam Pelayanan Kesehatan Usia Produktif;
- 11) Melaksanakan Peningkatan Kapasitas dan Supervisi ke Faskes Swasta (Klinik dan RS) dalam Yankes Usia Produktif dan Pencatat Pelaporan;
- 12) Melakukan Monitoring dan Evaluasi ke Petugas PKM dalam Pelaksanaan Skrining 9 Penyakit Prioritas PTM dan Pencatatan Pelaporan melalui SI PTM dan ASIK Skrining PTM;
- 13) Melakukan koordinasi terintegrasi dengan Dinas Pendidikan dan memenuhi sarana dan prasarana;
- 14) Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Penatalaksanaan Hipertensi;
- 15) Melaksanakan Rapat Koordinasi Lintas Program dan Jejaring (Faskes Swasta) dalam Temuan Kasus Hipertensi dan Pencatatan Kohort;
- 16) Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Kasus Hipertensi baik di Puskesmas dan Faskes Swasta;
- 17) Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Penatalaksanaan Diabetes Melitus;
- 18) Melaksanakan Rapat Koordinasi Lintas Program dan Jejaring (Faskes Swasta) dalam Temuan Kasus Diabetes Melitus dan Pencatatan Kohort;
- 19) Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Kasus Diabetes Melitus baik di Puskesmas dan Faskes Swasta;
- 20) Mendukung masyarakat dalam pemberdayaan ODGJ;
- 21) Peningkatan Kapasitas Petugas dalam melakukan Skrining Populasi Berisiko HIV;
- 22) Belum maksimal Peran Fasilitas Kesehatan Swasta (Klinik dan Rumah Sakit) dalam melakukan Skrining Populasi Berisiko HIV dan Pencatatan Pelaporan di SI-HA;
- 23) Belum tepat waktu pencatatan dan Pelaporan melalui SIHA;
- 24) Melakukan pengajuan kebutuhan tenaga sanitasi lingkungan/sanitarian. Melakukan penambahan anggaran untuk kegiatan penyehatan lingkungan. Meningkatkan koordinasi lintas program antara tenaga sanitasi lingkungan dengan pemegang program lainnya;
- 25) Monitoring & Evaluasi pemegang program secara intensif;

- 26) Monitoring dan Evaluasi secara Periodik Kegiatan Surveilans Berkoordinasi dengan Lintas Program;
- 27) Menjumlahkan manual, Ditambahkan SDM, adanya pelatihan SDM, Di buat 1 aplikasi yg simpel yang memuat semua laporan;
- 28) Melaksanakan Pemetaan Wilayah Risiko, Penduduk Rentan dan Berisiko Terdampak Bencana dengan Melibatkan Lintas Program dan Lintas Sektor (BPBD, Pemerintahan Kecamatan dan Desa);
- 29) Mengoptimalkan capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan;
- 30) Koordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk dapat menjangkau masyarakat untuk mendapatkan jaminan kesehatan;
- 31) Memberikan informasi terkait dengan fungsi Jaminan kesehatan untuk Masyarakat;
- 32) Dinas Kesehatan mengusulkan Anggaran yang bisa mengoptimalkan Kepesertaan untuk masyarakat yang dibantu pembayaran Jaminan Kesehatannya;
- 33) Penguatan Pelaporan Penatausahaan Keuangan untuk pengelolaan anggaran BOK puskesmas dan memaksimalkan pendapatan Puskesmas dengan meningkatkan pelayanan kesehatan;
- 34) Sosialisasi dan Penyebarluasan Informasi Pelaksanaan SKDR ke Faskes sebagai feedback Pelaporan;
- 35) Meningkatkan kerjasama dan jejaring rujukan dengan driver ambulans desa, puskesmas dan RS. Melalui pertemuan dengan driver ambulans desa se-kabupaten serang, rapat koordinasi bersama sub koordinator pelayanan rujukan Dinkes Kab. Serang dengan menghadirkan puskesmas dan RS di wilayah Kab. Serang;
- 36) Peningkatan Kapasitas kepada Peran Pendamping Minum Obat di Masyarakat dan Keluarga dalam pencegahan Penularan HIV;
- 37) Supervisi dan OJT Peran Fasilitas Kesehatan Swasta (Klinik dan Rumah Sakit) dalam pemantauan Pasien dalam Kohort HIV (SIHA);
- 38) Belum tepat waktu pencatatan dan Pelaporan melalui SIHA;
- 39) Penguatan dan pengawasan penggunaan SISROUTE dalam pelayanan Rujukan;
- 40) Membuka Formasi untuk jalur umum dalam Penerimaan PPPK Nakes;
- 41) Anggaran dari DAK POM untuk 30 Apotek saja;
- 42) Pembinaan kepada PJ puskesmas & kader untuk bersama dengan aparat desa dalam peningkatan strata posyandu;
- 43) Bekerjasama dengan lintas program untuk mengaktifkan GERMAS di lingkungannya masing-masing.

Pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan angka rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2022 mengalami **Peningkatan** yaitu sebesar **67%**

MISI 3 : Meningkatkan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman Yang Memadai Dan Berkualitas

Sasaran 1 :

Hasil pengukuran capaian kinerja misi 3 sasaran 1 yaitu ***Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Kawasan Dan Daerah Serta Aksesibilitas Antar Wilayah***, sebagai berikut:

Tabel 11 Evaluasi Kinerja Misi 3 Sasaran 1

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		CAPKIN 2023 (%)	CAPKIN 2022 (%)	CAPKIN 2023 - 2022 (%)	TARGET RPJMD 2023	CAPKIN 2023 : RPJMD (%)
			TARGET 2023	REALISASI 2023					
1	Cakupan Aksesibilitas antar Wilayah	%	100	100	100	100	0	100	100
2	Persentase Desa yang telah mendapat pelayanan Air Minum	%	88,34	88,01	99,62	100	-0,37	88,34	99,62
3	Persentase Desa yang telah Mendapatkan layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	%	72,70	72,70	100	100	0	72,70	72,70
4	Persentase Jumlah Bangunan Gedung Daerah Dengan Kondisi Baik	%	65	65	100	100	0	65	100
5	Persentase Kawasan Kumuh	%	0,16	0,14	114,29	0,14	57,22	0,16	114,29
6	Tingkat Pembinaan Badan Usaha Konstruksi	%	48,33	48,33	100	100	0	48,33	100
7	Persentase Drainase Kota Dengan Kondisi Baik	%	55,56	55,56	100	100	0	55,56	100
8	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	64,90	65	100,01	100	0,1	64,9	100,01
9	Tingkat Pemanfaatan Informasi Tata Ruang Dalam Pembangunan	%	100	100	100	100	0	100	100
10	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Point	20	20	100	100	0	20	100
11	Cakupan ketersediaan air baku	%	100	100	100	100	0	100	100
JUMLAH					1035,81	1000,14	78,73	586,73	1014,30
RATA RATA CAPAIAN SASARAN					103,58	90,92	8,75	65,19	101,43

Sumber : LKIP Dishub, DPUPR, DPRKP Kabupaten Serang tahun 2023

Hasil analisis capaian kinerja sasaran ***Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Kawasan Dan Daerah Serta Aksesibilitas Antar Wilayah*** dengan 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar ***103,58%*** dengan kategori ***Baik Sekali***

Sasaran tersebut dicapai program dan kegiatan antara lain yaitu:

- 1) PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
 - a. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha;
 - b. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.

- 2) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
 - a. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 3) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
 - a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 4) PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
 - a. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
- 5) PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
 - a. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 - b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil), Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
- 6) PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
 - a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- 7) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
 - a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Daerah Kabupaten/Kota
- 8) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
 - a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 9) PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
 - a. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
- 10) PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
 - a. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
- 11) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
 - a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 12) PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Permasalahan

Dari serangkaian program yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- 1) Masih belum optimalnya kontribusi CSR dalam penyediaan, penanganan dan pencegahan tumbuh dan berkembangnya Kawasan Permukiman Kumuh
- 2) Meningkatnya angka kemiskinan dan kurangnya kesadaran akan kebersihan lingkungan menjadi penyebab timbulnya Kawasan Kumuh di Kabupaten Serang

Solusi

- 1) Mengoptimalkan kontribusi CSR dalam penyediaan, penanganan dan pencegahan tumbuh dan berkembangnya Kawasan Permukiman Kumuh
- 2) Meningkatkan kesadaran Masyarakat akan kebersihan lingkungan
- 3) Mengupayakan penambahan dana untuk kawasan kumuh yang bersumber dari dana pusat, APBD provinsi dan khususnya APBD Kab.Serang.
- 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat menyediakan sarana dan prasarana air minum dan air limbah rumah tangga secara swadaya dan pencegahan kawasan kumuh.

- 5) Mendorong peran CSR dalam penyediaan sarana prasarana air minum dan air limbah rumah tangga bagi masyarakat kurang mampu untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya kawasan kumuh.

Pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan angka rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2022 mengalami **Kenaikan** yaitu sebesar **8,75%**

Sasaran 2 :

Hasil pengukuran capaian kinerja misi 3 sasaran 2 yaitu **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Kelestarian Sumber Daya Alam**, sebagai berikut:

Tabel 12 Evaluasi Kinerja Misi 3 Sasaran 2

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		CAPKIN 2023 (%)	CAPKIN 2022 (%)	CAPKIN 2023 - 2022 (%)	TARGET RPJMD 2023	CAPKIN 2023 : RPJMD (%)
			TARGET 2023	REALISASI 2023					
1	IKA (Indeks Kualitas Air)	Point	50,75	52,35	103,15	94,09	9,06	50,75	103,15
2	IKU (Indeks Kualitas Udara)	Point	83,00	68,35	82,35	96,99	-14,34	83,00	82,35
3	Indeks Tutupan Vegetasi	Poin	69,995	77,73	111,05	100,60	10,45	69,995	111,05
4	Persentase Penanganan Sampah	%	19,85	34,87	175,67	84,28	91,39	19,85	175,67
5	Persentase Rumah Layak Huni	%	90,49	99,79	110,27	89,88	99,37	90,49	110,27
JUMLAH					581,89	465,84	195,93	314,09	581,89
RATA RATA CAPAIAN SASARAN					116,38	93,17	39,19	62,82	116,38

Sumber : LKIP Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 dan LKIP DPRKP tahun 2023

Hasil analisis capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Kelestarian Sumber Daya Alam** dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar **116,38 %** dengan kategori **Baik Sekali**.

Sasaran tersebut dicapai program dan kegiatan antara lain yaitu:

- 1) PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
 - a. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - b. Kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi
- 2) PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
 - a. Kegiatan Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilihan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan Data Pemrosesan Akhir Di TPA/TPS/SPA PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
- 3) PROGRAM PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
 - a. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota;
 - b. Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota;

- c. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota;
 - d. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.
- 4) PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
- a. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota.

Permasalahan

Dari serangkaian program yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- 1) Jumlah sampel air melebihi target karena adanya kegiatan pemantauan secara online, continue dan otomatis melalui alat pantau ONLIMO.
- 2) Jumlah sampel udara dari kegiatan pemantauan dan monitoring kualitas udara tidak dapat memenuhi target dikarenakan ketersediaan anggaran tidak mencukupi.
- 3) Indeks Kualitas Air (IKA) melebihi target karena adanya pengawasan intensif dan insidental di industri – industri sepanjang Sungai Ciujung.
- 4) Indeks Kualitas Udara (IKU) tidak memenuhi target dikarenakan semakin meningkatnya potensi beban pencemaran akibat meningkatnya aktivitas manusia di wilayah Kabupaten Serang. Kegiatan industrialisasi, konversi lahan hijau menjadi lahan usaha (perumahan, industry dan usaha lainnya), meningkatnya jumlah kendaraan yang tidak lulus uji emisi menjadi potensi beban cemaran udara. Kondisi tersebut diperburuk oleh musim kemarau yang lebih panjang di tahun 2023.
- 5) Pelaksanaan uji emisi kendaraan dan penghijauan terutama di wilayah wilayah industri harus direalisasikan dengan optimal untuk mengelola kualitas udara.
- 6) Pengawasan terhadap industri- industri peleburan harus menjadi prioritas untuk mengendalikan potensi beban cemaran udara.
- 7) Masih belum optimalnya bantuan penanganan rumah tidak layak huni, baik dari pusat maupun dari provinsi.
- 8) Masih belum memadainya kontribusi APBD Kabupaten Serang untuk penanganan rumah tidak layak huni.
- 9) Belum optimalnya peran CSR bagi penanganan rumah tidak layak huni.

Solusi

- 1) Merealisasikan Pelaksanaan uji emisi kendaraan dan penghijauan terutama di wilayah wilayah industri secara optimal untuk mengelola kualitas udara;
- 2) Memprioritaskan Pengawasan terhadap industri- industri peleburan untuk mengendalikan potensi beban cemaran udara;
- 3) Mengupayakan peningkatan bantuan penanganan rumah tidak layak huni baik dari pusat maupun dari provinsi.
- 4) Meningkatkan kontribusi dana APBD untuk penanganan rumah tidak layak huni.
- 5) Mendorong optimalisasi peran CSR dalam penanganan rumah tidak layak huni dan bantuan bagi rumah korban bencana.

Pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan angka rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2022 mengalami Kenaikan yaitu sebesar **39,19%**.

MISI 4 : Meningkatkan Kemandirian Dan Daya Saing Ekonomi Masyarakat, Untuk Optimalisasi Penyerapan Tenaga Kerja Dan Penanggulangan Kemiskinan

Sasaran 1 :

Hasil pengukuran capaian kinerja misi 4 sasaran 1 yaitu *Meningkatnya Produktivitas, Ketahanan, Dan Peran Ekonomi Sektor Pertanian Dalam Arti Luas*, sebagai berikut:

Tabel 13 Evaluasi Kinerja Misi 4 Sasaran 1

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		CAPKIN 2023 (%)	CAPKIN 2022 (%)	CAPKIN 2023 - 2022 (%)	TARGET RPJMD 2023	CAPKIN 2023 : RPJMD (%)
			TARGET 2023	REALISASI 2023					
1	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	%	2,84	4	140,84	96,38	44,46	2,84	140,84
2	Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan	%	1,48	4	270	201	69	1,48	270
JUMLAH					410,84	297,38	113,46	4,32	410,84
RATA RATA CAPAIAN SASARAN					205,42	148,69	78,96	2,16	205,42

Sumber : BPS Kabupaten Serang tahun 2023

Hasil analisis capaian kinerja sasaran *Meningkatnya Produktivitas, Ketahanan, Dan Peran Ekonomi Sektor Pertanian Dalam Arti Luas* dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar **205,42%** dengan kategori **Baik Sekali**

Sasaran tersebut dicapai program dan kegiatan antara lain yaitu :

- 1) PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
 - a. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - b. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
 - a. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
- 3) PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
 - a. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil;
 - b. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

Permasalahan

Dari serangkaian program yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- 1) Rendahnya Kapasitas petani;
- 2) Kurangnya Semangat Petani untuk mengembangkan pertanian.

Solusi

- 1) Peningkatan Kualitas Petani dan Penyuluh Pertanian;
- 2) Perluasan Komoditas Tanaman.

Pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan angka rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2022 mengalami **Kenaikan** yaitu sebesar **78,96%**

Keterangan:

Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan dan PDRB sector Pertanian merupakan realisasi capaian tahun 2022, karena Capaian 2023 belum release dari BPS Kabupaten Serang.

Sasaran 2 :

Hasil pengukuran capaian kinerja misi 4 sasaran 2 yaitu **Meningkatnya Kapasitas UMKM Yang Sinergi Dengan Dunia Usaha Perdagangan Dan Industri**, sebagai berikut:

Tabel 14 Evaluasi Kinerja Misi 4 Sasaran 2

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		CAPKIN 2023 (%)	CAPKIN 2022 (%)	CAPKIN 2023 - 2022 (%)	TARGET RPJMD 2023	CAPKIN 2023 : RPJMD (%)
			TARGET 2023	REALISASI 2023					
1	Proporsi peningkatan SHU koperasi	%	2	9,17	458,5	142	316,5	2	2
2	Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	10	19,94	199	248,6	-49,6	10	10
3	Pertumbuhan Sektor Perdagangan Dalam PDRB	%	0,70	5,62	802	393	409	0,7	0,7
4	Pertumbuhan Sektor Industri Dalam PDRB	%	3,22	5,05	156	141	15	3,22	3,22
JUMLAH					1640,5	924,6	691	15,92	15,92
RATA RATA CAPAIAN SASARAN					410,125	231,125	172,75	3,98	3,98

Sumber : LKIP DISKOUOPERINDAG Kabupaten Serang tahun 2023

Hasil analisis capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Kapasitas UMKM Yang Sinergi Dengan Dunia Usaha Perdagangan Dan Industri** dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar **403,38 %** dengan kategori **Baik Sekali**.

Sasaran tersebut dicapai program dan kegiatan antara lain yaitu :

- 1) PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
 - a. Penerbitan izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 2) PROGRAM PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI
 - a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 3) PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI
- 4) PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
- 5) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
- 6) PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
 - a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan
- 7) PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
 - a. Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil
- 8) PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

- a. Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan bahan Berbahaya di tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 9) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
 - a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
 - b. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.
- 10) PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
 - a. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota;
 - b. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- 11) PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- 12) PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
- 13) PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
- 14) PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
- 15) PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota.
- 16) PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

Permasalahan

Dari serangkaian program yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- 1) Rendahnya produktivitas dan kualitas usaha koperasi;
- 2) Rendahnya tingkat koordinasi dan kerja sama antar lembaga dalam pengembangan koperasi;
- 3) Keterbatasan sarana dan prasarana produksi, akses permodalan dan jaringan pemasaran produk UMKM;
- 4) Belum memadainya kualitas daya saing produk UMKM untuk meningkatkan daya saing produk daerah;
- 5) Masih banyaknya UMKM yang kurang melek terhadap teknologi, terutama teknologi informasi;
- 6) Untuk kegiatan pengawasan kebutuhan strategis ketika melaksanakan operasi Pasar hanya mengandalkan pihak BUMN BUlog dalam hal ini komoditi beras, gula, tepung, minyak dengan banyak nya agenda bulog untuk seluruh provinsi banten tidak maksimal untuk pelaksanaan operasi pasar kab. Serang;
Penyebaran distribusi pupuk bersubsidi masih belum seimbang dengan luas lahan pertanian. Sehingga penyebaran di tiap pengecer pupuk terbatas. Persoalan jarak juga menyebabkan harga pupuk tidak sesuai HET adanya penambahan bea distribusi/transport.

Solusi

- 1) Pemerintah baik pusat maupun daerah harus hadir dalam membantu koperasi melalui pemberian pelatihan, modal usaha, dan lainnya;
- 2) Diperbanyak program dan kegiatan yang mengadakan pelatihan dan pemberian bantuan kepada Usaha Mikro;
- 3) Diperbanyak pelatihan dan dan fasilitasi dalam hal pemasaran dan pembukuan;
- 4) Fasilitasi pemasaran baik itu melalui marketplace, pameran dan kemitraan dengan para waralaba;
- 5) Fasilitasi UMKM dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya. selain itu dilakukan sosialisasi masalah pembiayaan dengan para UMKM;

- 6) Fasilitas, pelatihan produk, pemasaran dan kemitraan;
- 7) Menggandeng BUMD Dan pihak swasta lain yang mempunyai barang sembako strategis yg diikutsertakan dalam kegiatan operasi pasar;
- 8) Menganalisa kembali pemenuhan kuota alokasi pupuk yang akan disampaikan. Turut sertakan tim pengawas pupuk bersubsidi untuk dilibatkan ketika kuota pupuk akan disampaikan provinsi.

Pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan angka rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2022 mengalami **Kenaikan** yaitu sebesar **172,73 %**

Keterangan

- 1) Untuk Indikator Nomor 1 Proporsi Peningkatan SHU Koperasi dari target 2 % realisasinya 9,17 atau sama dengan 458 %;
- 2) Untuk Indikator sasaran Nomor 2 Pertumbuhan Wirausaha Baru dari target 10 % realisasinya 19,94 % atau sama dengan 199 %;
- 3) Untuk Indikator sasaran Nomor 3 Pertumbuhan Sektor Perdagangan Dalam PDRB target 0,7 % untuk realisasi masih melihat hasil dari BPS Tahun 2022, karena PDRB Tahun 2023 keluar di Tahun 2024. Realisasi Tahun 2022 sebesar 5,62 % atau sebesar 802 %;
- 4) Untuk Indikator sasaran Nomor 4 Pertumbuhan Sektor Industri Dalam PDRB target 3,22 % untuk realisasi masih melihat hasil dari BPS Tahun 2022, karena PDRB Tahun 2023 keluar di Tahun 2024. Realisasi Tahun 2022 sebesar 5,05 % atau sebesar 156 %.

Sasaran 3 :

Hasil pengukuran capaian kinerja misi 4 sasaran 3 yaitu **Investasi Daerah**, sebagai berikut:

Tabel 15 Evaluasi Kinerja Misi 4 Sasaran 3

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		CAPKIN 2023 (%)	CAPKIN 2022 (%)	CAPKIN 2023 - 2022 (%)	TARGET RPJMD 2023	CAPKIN 2023 : RPJMD (%)
			TARGET 2023	REALISASI 2023					
1	PMA	%	3	49,52	1.651	1.538	113	3	550,33
2	PMDN	%	3	62,63	2.087,51	-737,66	2.825,16	3	695,83
JUMLAH					3.738,5	800,34	2.938,16	6	1.246,16
RATA RATA CAPAIAN SASARAN					1.869,2	400,17	1.469,08	3	623,08

Sumber : LKIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023

Hasil analisis capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Investasi Daerah** dengan 2 (Dua) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar **1.869,2 %** dengan kategori **Baik Sekali**.

Sasaran tersebut dicapai program dan kegiatan antara lain yaitu :

- 1) PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
- 2) PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- 3) PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.
- 4) PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

- a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- 5) PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
 - a. Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Nonperizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Permasalahan

Dari serangkaian program yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- 1) Belum terintegrasinya aplikasi dari Kementerian dan Lembaga dengan OSS terkait dengan pemenuhan standar teknis;
- 2) Pelayanan PBG dengan menggunakan aplikasi SIMBG masih mengalami kendala atau gangguan sistem;
- 3) Kurangnya SDM dalam melakukan pengawasan perizinan yang memiliki kompetensi dan keahlian tertentu;
- 4) Tidak muncul secara tersurat dalam Pemenuhan izin dasar terutama PKKPR dan PBG untuk kegiatan usaha yang masuk Resiko Rendah dan Menengah Rendah (usaha mikro kecil)

Solusi

- 1) Berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga;
- 2) Berkoordinasi dengan Tim IT dari Kementerian PUPR;
- 3) Mengusulkan penambahan SDM yang memiliki kompetensi dan keahlian tertentu ke BKSDM;
- 4) Ada klasifikasi pemenuhan izin dasar dari Kementerian dan Lembaga untuk kegiatan usaha yang masuk Resiko Rendah dan Menengah Rendah (usaha mikro kecil).

Pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan angka rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2022 mengalami **Kenaikan** yaitu sebesar **1.469,03%**

Keterangan

- 1) Data Capaian berdasarkan LKPJ Kabupaten Serang tahun 2023.

Sasaran 4:

Hasil pengukuran capaian kinerja misi 4 sasaran 4 yaitu **Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Bagi Perekonomian Daerah**, sebagai berikut:

Tabel 16 Evaluasi Kinerja Misi 4 Sasaran 4

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		CAPKIN 2023 (%)	CAPKIN 2022 (%)	CAPKIN 2023 - 2022 (%)	TARGET RPJMD 2023	CAPKIN 2023 : RPJMD (%)
			TARGET 2023	REALISASI 2023					
1	Kontribusi PAD Pariwisata	%	22.000.000.000	40.555.649.437	184,34	172,77	11,57	28.000.000.000	144,84
JUMLAH					184,34	172,77	11,57	28.000.000.000	144,84
RATA RATA CAPAIAN SASARAN					184,34	172,77	11,57	28.000.000.000	144,84

Sumber : LKIP 2023 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Hasil analisis capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Daya Saing Dan Produktivitas Tenaga Kerja**, dengan 1 (satu) indikator, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar **183,34 %** dengan kategori **Baik Sekali**.

Sasaran tersebut dicapai program dan kegiatan antara lain yaitu :

- 1) PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
 - a. Kegiatan Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota;
 - b. Kegiatan Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - c. Kegiatan Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - d. Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
 - a. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - c. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
- 3) PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
 - a. Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- 4) PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.

Permasalahan

Dari serangkaian program yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- 1) Adanya keterbatasan anggaran pada saat pengajuan pelaksanaan sub kegiatan sehingga perlu dilakukan efisiensi dalam pelaksanaannya;
- 2) Akibat terjadi keterbatasan anggaran, salah satu event promosi pariwisata yang akan dilaksanakan terpaksa harus dibatalkan karena anggarannya dialihkan untuk menutupi kebutuhan belanja lainnya pada disporapar sesuai dengan kebijakan pimpinan;
- 3) Akibat adanya keterbatasan anggaran, pembayaran honorarium tenaga administrasi pendataan kunjungan wisatawan bulan Desember tahun 2023 belum dapat dilakukan.

Solusi

- 1) Berkoordinasi dengan BPKAD kabupaten Serang terkait jenis-jenis rincian belanja yang diprioritaskan untuk dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran;
- 2) Berkoordinasi dengan BPKAD kabupaten Serang terkait kebijakan tersebut dan mengkomunikasikan dengan stakeholder terkait perihal pembatalan event; dan
- 3) Berkoordinasi dengan BPKAD Kabupaten Serang untuk mengakomodir pembayaran tersebut ke dalam anggaran lunjuran tahun 2024.

Pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan angka rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2022 mengalami **Kenaikan** yaitu sebesar **11,57 %**

Sasaran 5 :

Hasil pengukuran capaian kinerja misi 4 sasaran 5 yaitu **Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Dan Desa**, sebagai berikut:

Tabel 17 Evaluasi Kinerja Misi 4 Sasaran 5

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		CAPKIN 2023 (%)	CAPKIN 2022 (%)	CAPKIN 2023 - 2022 (%)	TARGET RPJMD 2023	CAPKIN 2023 : RPJMD (%)
			TARGET 2023	REALISASI 2023					
1	Prosentase Desa Maju Dan Mandiri Berdasarkan Dari IDM	%	16,87	24.54	145.5	130.7	14.8	16.87	125
JUMLAH					145.5	130.7	14.8	16.87	125

RATA RATA CAPAIAN SASARAN	145.5	130.7	14.8	16.87	125
----------------------------------	-------	-------	------	-------	-----

Sumber : LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2023

Hasil analisis capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Dan Desa** dengan 1 (Satu) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar **145,5%** dengan kategori **Baik Sekali**.

Sasaran tersebut dicapai program dan kegiatan antara lain yaitu :

- 1) PROGRAM PENATAAN DESA
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa.
- 2) PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
 - a. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa
- 3) PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
 - a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.
- 4) PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
 - a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota.

Permasalahan

Dari serangkaian program yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- 1) Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang, baik jumlah personil maupun spesifikasi keahlian yang diperlukan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi yang diemban;
- 2) Tingkat kapasitas kemampuan aparatur pemerintah desa;
- 3) Masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Solusi

- 1) Melaksanakan koordinasi dan melakukan permintaan penambahan personil sesuai kompetensi kepala BKSDM;
- 2) Melakukan bimbingan teknis dan pelatihan pelatihan, serta sosialisasi bagi aparatur desa;
- 3) Melakukan pendampingan/ pembinaan/ sosialisasi kepada lembaga lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.

Pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan angka rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2022 mengalami **Kenaikan** yaitu sebesar **14,8 %**.

Keterangan

- 1) Data Capaian IDM Tahun 2023 berdasarkan Indeks Desa Membangun Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi Tahun 2023.

Sasaran 6 :

Hasil pengukuran capaian kinerja misi 4 sasaran 6 yaitu **Meningkatnya Daya Saing Dan Produktivitas Tenaga Kerja**, sebagai berikut:

Tabel 18 Evaluasi Kinerja Misi 4 Sasaran 6

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		CAPKIN 2023 (%)	CAPKIN 2022 (%)	CAPKIN 2023 - 2022 (%)	TARGET RPJMD 2023	CAPKIN 2023 : RPJMD (%)
			TARGET 2023	REALISASI 2023					
1	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	%	25	93,68	374,72	199,67	175,05	25	374,72
JUMLAH					374,72	199,67	175,05	25	374,72
RATA RATA CAPAIAN SASARAN					374,72	199,67	175,05	25	374,72

Sumber : LKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2023

Hasil analisis capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Daya Saing Dan Produktivitas Tenaga Kerja**, dengan 1 (Satu) indikator, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar **374,72 %** dengan kategori **Baik Sekali**.

Sasaran tersebut dicapai program dan kegiatan antara lain yaitu :

- 1) PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi.
- 2) PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
 - a. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
- 3) PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
 - a. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
- 4) PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
 - a. Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Permasalahan

Dari serangkaian program yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- 1) Masih kurangnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan pada pekerja, pengusaha, dan perusahaan dengan tingginya perselisihan hubungan industrial yang terdaftar pada Disnakertrans Kabupaten Serang;
- 2) Kuota yang diberikan Kemendes dan Disnakertrans Provinsi Banten hanya 2 KK dari target kinerja 10 KK, sehingga Disnakertrans Kabupaten Serang hanya dapat memberikan pelatihan dan mengirimkan 2 KK atau 4 orang.

Solusi

- 1) Meningkatkan pembinaan terhadap pekerja dan pengusaha dalam upaya pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan pencegahan perselisihan hubungan industrial;
- 2) Memaksimalkan dan menjalankan kuota yang tersedia.

Pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan angka rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2022 mengalami **Kenaikan** yaitu sebesar **175,05%**.

Keterangan

- 1) Targetnya di angka 25% karena mengacu pada kondisi pandemi covid-19, sehingga pertambahan target tiap tahunnya sesuai dengan acuan angka tahun tahun sebelumnya.

Sasaran 7 :

Hasil pengukuran capaian kinerja misi 4 sasaran 7 yaitu **Meningkatnya Ketahanan Pangan**, sebagai berikut:

Tabel 19 Evaluasi Kinerja Misi 4 Sasaran 7

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		CAPKIN 2023 (%)	CAPKIN 2022 (%)	CAPKIN 2023-2022 (%)	TARGET RPJMD 2023	CAPKIN 2023 : RPJMD (%)
			TARGET 2023	REALISASI 2023					
1	Indeks Ketahanan Pangan	%	77,20	78,63	101,85	100,71	1,14	77,20	101,85
JUMLAH					101,85	100,71	1,14	77,20	101,85
RATA RATA CAPAIAN SASARAN					101,85	100,71	1,14	77,20	101,85

Sumber : LKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2023

Hasil analisis capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Ketahanan Pangan**, dengan 1 (Satu) indikator, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar **101,85 %** dengan kategori **Baik Sekali**.

Sasaran tersebut dicapai program dan kegiatan antara lain yaitu :

- 1) PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
 - a. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Permasalahan

Dari serangkaian program yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- 1) Capaian Kinerja DKPP Pada IKP Tahun 2023 terpenuhi **101,85%** dikarenakan realisasi capaian Program dari target 350 Ton Sedangkan yang dihasilkan 400 Ton

Solusi

- 1) Pengembangan pada cadangan pangan pemerintah.

Pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan angka rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2022 mengalami **Kenaikan** yaitu sebesar **1,14%**.

Keterangan

- 1) Data Capaian berdasarkan data BPS tahun 2022, data capaian tahun 2023 belum keluar.

Sasaran 8 :

Hasil pengukuran capaian kinerja misi 4 sasaran 8 yaitu **Meningkatnya Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial Serta Pengendalian Penduduk**, sebagai berikut:

Tabel 20 Evaluasi Kinerja Misi 4 Sasaran 8

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		CAPKIN 2023 (%)	CAPKIN 2022 (%)	CAPKIN 2023-2022 (%)	TARGET RPJMD 2023	CAPKIN 2023 : RPJMD (%)
			TARGET 2023	REALISASI 2023					
1	Persentase PMKS yang mendapatkan program	%	3	1,70	56,67	100,33	-43,66	3	56,67

	elayanan sosial								
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Point	92,10	92,32	100,24	99,86	0,38	92,10	100,24
3	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak serta Trafficking	%	60	43,68	72,80	104,58	(31,78)	60	43,68
4	Total Fertility Rate	Point	2,24	2,18	102,75	116,06	(13,31)	2,24	102,75
JUMLAH					425,28	420,83	4,45	157,34	425,28
RATA RATA CAPAIAN SASARAN					106,32	105,21	1,11	39,34	106,32

Sumber : LKIP DKBP3A Tahun 2023 & Dinas Sosial Tahun 2023

Hasil analisis capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial Serta Pengendalian Penduduk** dengan 4 (Empat) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar **106,32 %** dengan kategori **Baik Sekali**.

Sasaran tersebut dicapai program dan kegiatan antara lain yaitu :

- 1) PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 - a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- 2) PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
 - a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
- 3) PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
 - a. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan dan Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
 - a. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- 5) PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
 - a. Kegiatan Kelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
- 6) PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
 - a. Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- 7) PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
 - a. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk;
 - b. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- 8) PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal;
 - b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB);

- c. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
- 9) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga
- 10) PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
 - a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial;
 - b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti sosial.
- 11) PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
 - a. Kegiatan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
- 12) PROGRAM PENANGANAN BENCANA
 - a. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.

Permasalahan

Dari serangkaian program yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- 1) Capaian Kinerja Dinsos Tahun 2023 tidak terpenuhi 100 % dikarenakan realisasi capaian Program Penanganan Bencana dari target 9400 Orang realisasi sebesar 5326 Orang. Hal tersebut dikarenakan bencana yang terjadi di tahun 2023 tidak sebanyak tahun sebelumnya.

Solusi

- 1) Menurunkan target korban Bencana di tahun selanjutnya.

Pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan angka rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2022 mengalami **Kenaikan** yaitu sebesar **1,11%**.

MISI 5 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional

Sasaran 1 :

Hasil pengukuran capaian kinerja misi 5 sasaran 1 yaitu **Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**, sebagai berikut:

Tabel 21 Evaluasi Kinerja Misi 5 Sasaran 1

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		CAPKIN 2023 (%)	CAPKIN 2022 (%)	CAPKIN 2023 - 2022 (%)	TARGET RPJMD 2023	CAPKIN 2023 : RPJMD (%)
			TARGET 2023	REALISASI 2023					
1	Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi	Predikat	B	BB	200	50	150	B	200
2	Opini BPK	WTP / WDP / TMP	WTP	WTP	100	100	0	WTP	100
3	Nilai LPPD	Poin	4,20	3,24	77,14	68,54	8,6	4,20	3,24

4	Nilai SAKIP	Predikat	BB	BB	100	100	100	BB	BB
5	Jumlah OPD pelayanan melaksanakan Zona integritas (ZI) WBBM WBK	OPD	1	0	0	0	0	1	0
JUMLAH					477,14	318,54	258,60	5,20	303,24
RATA RATA CAPAIAN SASARAN					95,43	63,71	51,72	2,60	75,81

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Kemenpan RB Tahun 2023;
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI tahun 2022;
Laporan Hasil (LPPD).

Hasil analisis capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** dengan 5 (Lima) indikator kinerja sasaran Nilai Sakip, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar **95,43 %** dengan kategori **Baik**.

Sasaran tersebut dicapai program dan kegiatan antara lain yaitu :

- 1) PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN
 - a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;
 - b. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;
 - c. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
 - d. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah.
- 2) PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
 - a. Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 3) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - b. Penataan Organisasi

Permasalahan

Dari serangkaian program yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- 1) Sistem Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah masih Belum optimal karena belum terintegrasinya dengan sirup, atisisbada;
- 2) Nilai SAKIP sudah mencapai target pada kategori BB namun masih belum optimal dalam Implementasi SAKIP nya.

Solusi

- 1) Terus Melakukan Koordinasi, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, atau penghapusan barang milik daerah;
- 2) Terus meningkatkan Implementasi SAKIP dengan cara Koordinasi, Pembinaan, dan Evaluasi pada seluruh Perangkat Daerah;
- 3) Meningkatkan Komitmen Pimpinan dalam hal Implementasi SAKIP.

Pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan angka rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2022 mengalami **Kenaikan** yaitu sebesar **51,72%**

Keterangan

- 1) Adapun untuk capaian Opini BPK 2023 masih belum dimasukan karena masih dalam tahap proses;
- 2) Data Capaian LPPD adalah nilai Capaian tahun 2022.

Sasaran 2 :

Hasil pengukuran capaian kinerja misi 5 sasaran 2 yaitu **Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**, sebagai berikut:

Tabel 22 Evaluasi Kinerja Misi 5 Sasaran 2

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		CAPKIN 2023 (%)	CAPKIN 2022 (%)	CAPKIN 2023 - 2022 (%)	TARGET RPJMD 2023	CAPKIN 2023 : RPJMD (%)
			TARGET 2023	REALISASI 2023					
1	Tingkat Maturitas SPIP	%	3.60	3.07	85.27	93.2	-7.93	3.60	85.2
JUMLAH					85.27	93.2	-7.93	3.60	85.2
RATA RATA CAPAIAN SASARAN					85.27	93.2	-7.93	3.60	85.2

Sumber : LKIP Inspektorat tahun 2023

Hasil analisis capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah** dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar **85,27%** dengan kategori **Baik**.

Sasaran tersebut dicapai program dan kegiatan antara lain yaitu :

- 1) PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
 - b. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - c. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
- 2) PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
 - a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
 - b. Pendampingan dan Asistensi

Permasalahan

Dari serangkaian program yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- 1) Dalam Pelaksanaan Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, pada Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala pada umumnya sudah berjalan dengan baik, namun ada sedikit permasalahan yaitu terkait dengan penyelesaian laporan hasil pengawasan (LHP) masih ada tim yang belum tepat waktu penyampaiannya;
- 2) Belum semua praktik pengendalian intern terdokumentasi dengan baik;
- 3) Efektifitas belum sepenuhnya dievaluasi oleh APIP.

Solusi

- 1) Melakukan Pelatihan Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (LHP);
- 2) Pelaksanaan Expose internal untuk memonitoring pelaksanaan penyusunan LHP;
- 3) Peningkatan dalam pengendalian Intern;
- 4) Menindaklanjuti seluruh saran yang direkomendasikan oleh BPK terkait dengan pemenuhan Tingkat Kapabilitas APIP dan Tingkat Maturitas SPIP.

Pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan angka rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2022 mengalami **Penurunan** yaitu sebesar **7,93 %**.

Sasaran 3 :

Hasil pengukuran capaian kinerja misi 5 sasaran 3 yaitu **Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah**, sebagai berikut:

Tabel 23 Evaluasi Kinerja Misi 5 Sasaran 3

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		CAPKIN 2023 (%)	CAPKIN 2022 (%)	CAPKIN 2023 - 2022 (%)	TARGET RPJMD 2023	CAPKIN 2023 : RPJMD (%)
			TARGET 2023	REALISASI 2023					
1	Tingkat Pertumbuhan PAD	%	3,28	1,65	50,30	883,93	-833,63	3,28	50,30
JUMLAH					50,30	883,93	-833,63	3,28	50,30
RATA RATA CAPAIAN SASARAN					50,30	883,93	-833,63	3,28	50,30

Sumber : LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 2023

Hasil analisis capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah** dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar **50,30 %** dengan kategori **Baik**

Sasaran tersebut dicapai program dan kegiatan antara lain yaitu :

- 1) PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Permasalahan

Dari serangkaian program yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- 1) Pada Jenis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah dilakukan pemutakhiran nilai tanah namun belum memberikan dampak yang positif dan signifikan karena terdapat keberatan wajib pajak atas kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan yang mengakibatkan kecenderungan untuk menahan pembayaran dan berharap adanya penyesuaian kembali NJOP pada nilai ketetapan sebelumnya walaupun menyadari adanya ketimpangan nilai jika dibandingkan dengan kondisi harga pasar terkini dan telah mendapatkan keringanan berupa stimulus sebagai pemberian insentif pajak;
- 2) Proyeksi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) telah menghitung potensi pajak atas pasir laut berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Provinsi Banten. Akan tetapi, sepanjang tahun 2023 tidak ada pelaporan dan pembayaran atas izin yang dikeluarkan mengingat belum adanya kegiatan akibat belum terpenuhinya syarat operasional atas kegiatan eksploitasi atas izin MBLB yang dimohonkan;
- 3) Proyeksi penerimaan telah menghitung atas adanya rasionalisasi atau penyesuaian atas hasil analisa Zona Nilai Tanah (ZNT) di Tahun 2023, penyesuaian tersebut diyakini akan membawa pengaruh terhadap peningkatan nilai BPHTB dimana sebelumnya didominasi dengan nilai nihil karena NJOP sangat jauh dengan nilai pasar. Namun demikian, pada pelaksanaannya banyak wajib pajak BPHTB yang keberatan atas penyesuaian NJOP tersebut sehingga menghambat realisasi penerimaan BPHTB yang diproyeksikan;
- 4) Potensi penerimaan pendapatan yang bersumber dari retribusi daerah sangat besar namun terkait adanya beberapa jenis retribusi yang akan dihapuskan pada regulasi yang baru (Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD) membuat beberapa jenis Retribusi mengalami penurunan. Kemudian adanya kesulitan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan retribusi terutama yang dilakukan secara manual sehingga belum dapat ditindaklanjuti secara optimal;

- 5) Proyeksi penerimaan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) memperhitungkan potensi atas seluruh berkas permohonan penerbitan PBG yang telah didaftarkan. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak permohonan atas izin PBG yang tidak memenuhi syarat sehingga permohonan atas izin PBG tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Hal ini pada akhirnya berdampak pada rendahnya Realisasi Retribusi PBG.

Solusi

- 1) Perlu dilakukan sosialisasi secara masif kepada seluruh wajib pajak PBB tentang rasionalisasi atau pemutakhiran nilai tanah untuk memberikan pemahaman kepada seluruh wajib pajak PBB bahwa nilai tanah sebelum rasionalisasi masih sangat jauh dari nilai pasar sehingga perlu dilakukan pemutakhiran atas nilai tanah tersebut dan pemutakhiran nilai tanah ini merupakan pemutakhiran yang pertama sejak pelimpahan pengelolaan PBB pada tahun 2014;
- 2) Perlu dilakukan pengawasan atas izin usaha pertambangan jenis pasir laut;
- 3) Perlu dilakukan sosialisasi secara masif kepada seluruh wajib pajak BPHTB tentang rasionalisasi atau pemutakhiran nilai tanah;
- 4) Perlu dilakukan pengawasan atas potensi retribusi daerah secara umum;
- 5) Perlu dilakukan sosialisasi secara masif kepada pemohon izin PBG untuk dapat melengkapi persyaratan permohonan.

Pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan angka rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2022 **Penurunan** yaitu sebesar **-833,63 %**.

Keterangan

- 1) LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2023.

Sasaran 4 :

Hasil pengukuran capaian kinerja misi 5 sasaran 4 yaitu **Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Berbasis Data, Penelitian, Dan Pengembangan Inovasi**, sebagai berikut:

Tabel 24 Evaluasi Kinerja Misi 5 Sasaran 4

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		CAPKIN 2023 (%)	CAPKIN 2022 (%)	CAPKIN 2023 - 2022 (%)	TARGET RPJMD 2023	CAPKIN 2023 : RPJMD (%)
			TARGET 2023	REALISASI 2023					
1	Nilai konsistensi perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Nilai capaian kinerja kegiatan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Indeks / Kategori Inovasi Daerah	Indeks / Kategori	Inovatif	Inovatif	100	100	100	Inovatif	100
4	Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan	%	70	70	100	100	0	70	100
JUMLAH					400	400	300	270	400
RATA RATA CAPAIAN SASARAN					100	100	75	67,5	100

Sumber :

LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023

Hasil analisis capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Berbasis Data, Penelitian, Dan Pengembangan Inovasi**, dengan 4 (Empat) indikator, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar **100%** dengan kategori **Baik Sekali**.

Sasaran tersebut dicapai program dan kegiatan antara lain yaitu :

- 1) PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
 - a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Dan Pendanaan;
 - b. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - c. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Bidang Pembangunan Daerah
- 2) PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 - a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) ;
 - c. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- 3) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 - a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
 - b. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan;
 - c. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - d. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi
- 4) PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

Permasalahan

Dari serangkaian program yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- 1) Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal yang direncanakan
- 2) Keterbatasan sumber daya dan sarpras pelaksanaan kegiatan

Solusi

- 1) Koordinasi yang baik antar penyelenggara kegiatan
- 2) Percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal perencanaan dan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan
- 3) Optimalisasi sumberdaya dan sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan

Pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan angka rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2022 mengalami **Kenaikan** yaitu sebesar **75 %**.

Keterangan

- 1) Data Capaian Kinerja berdasarkan LKIP *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan* dan LKIP *Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik* Kabupaten Serang tahun 2023;

Sasaran 5 :

Hasil pengukuran capaian kinerja misi 5 sasaran 5 yaitu **Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur**, sebagai berikut:

Tabel 25 Evaluasi Kinerja Misi 5 Sasaran 5

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		CAPKIN 2023 (%)	CAPKIN 2022 (%)	CAPKIN 2023 - 2022 (%)	TARGET RPJMD 2023	CAPKIN 2023 : RPJMD (%)
			TARGET 2023	REALISASI 2023					
1	Tingkat Capaian Kinerja Pegawai Kategori Baik	%	96	99,97	107,2	105,2	2,2	96	107,2
2	Cakupan Standar Kompetensi Pegawai	%	95,50	99,92	105,1	105,3	0,1	95,50	105,1
JUMLAH					212,3	210,5	2,3	191,5	212,3
RATA RATA CAPAIAN SASARAN					106,15	105,25	1,15	95,75	106,15

Sumber : LKIP Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Tahun 2023

Hasil analisis capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur** dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar **106,15 %** dengan kategori **Baik Sekali**.

Sasaran tersebut dicapai program dan kegiatan antara lain yaitu :

- 1) PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
 - b. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - c. Mutasi dan Promosi ASN
 - d. Pengembangan Kompetensi ASN
 - e. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- 2) PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 - a. Pengembangan Kompetensi Teknis
 - b. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Permasalahan

Dari serangkaian program yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- 1) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia kegiatan pendidikan dan pelatihan seharusnya memiliki anggaran 0,16 dari total APBD Kabupaten Serang akan tetapi realisasi masih kekurangan anggaran diklat. banyak kegiatan diklat yang belum terlaksana seperti Diklat Kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis lainnya, dsb.

Solusi

- 1) Mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang sifatnya dibiayai diluar APBD Kabupaten Serang, Seperti Diklat teknis yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Banten, BPSDM Kemendagri dan Pusdiklatsar DKI.

Pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan angka rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2022 mengalami **Kenaikan** yaitu sebesar **1,15 %**.

Sasaran 6 :

Hasil pengukuran capaian kinerja misi 5 sasaran 6 yaitu **Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik Yang Didukung Kemajuan TI**, sebagai berikut:

Tabel 26 Evaluasi Kinerja Misi 5 Sasaran 6

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		CAPKIN 2023 (%)	CAPKIN 2022 (%)	CAPKIN 2023 - 2022 (%)	TARGET RPJMD 2023	CAPKIN 2023 : RPJMD (%)
			TARGET 2023	REALISASI 2023					
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID)	Point	75	92,55	123,4	132,21	-8,81	75	123,4
2	Indeks Kematangan Penerapan SPBE	Point	2,98	3,23	108,39	88,59	19,8	2,98	108,39
3	Indeks Keamanan informasi (Indeks KAMI)	Point	140	0	0	0	0	140	0
JUMLAH					213,79	220,79	10,99	217,98	231,79
RATA RATA CAPAIAN SASARAN					77,26	73,60	3,66	72,66	77,26

Sumber : LKIP Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik tahun 2023

Hasil analisis capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik yang didukung Kemajuan TI** dengan 3 (Tiga) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar **77,26 %** dengan kategori **Baik**.

Sasaran tersebut dicapai program dan kegiatan antara lain yaitu :

- 1) PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
 - a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
 - a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 3) PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Permasalahan

Dari serangkaian program yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- 1) Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI): Karena pihak bssn tahun kemarin padat harus melayani prov kab kota seluruh indonesia dan untuk kab serang bisa dilaksanakannya tahun ini.

Solusi

- 1) Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI): Dilakukan penilaian mandiri oleh kominfo sebelum diverifikasi oleh pihak BSSN.

Pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan angka rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2022 mengalami **Kenaikan** yaitu sebesar **3,66 %**

Keterangan

- 1) Data Capaian Kinerja berdasarkan LKIP BKPSDM Kabupaten Serang tahun 2023;
- 2) Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID): Data Capaian 2023 merupakan capaian dari 2022, karena penilaian tahun 2023 belum dilaksanakan;

- 3) Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI): Penilaian Indeks KAMI Tahun 2022 sedang dilaksanakan penilaian secara mandiri oleh diskominfosatik kabupaten serang, selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh pihak BSSN pada tahun 2024;
- 4) Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI): Penilaian Indeks KAMI Tahun 2023 akan dilaksanakan pada triwulan II tahun 2024.

Sasaran 6 :

Hasil pengukuran capaian kinerja misi 5 sasaran 6 yaitu **Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik Yang Didukung Kemajuan TI**, sebagai berikut:

Tabel 27 Evaluasi Kinerja Misi 5 Sasaran 6

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		CAPKIN 2023 (%)	CAPKIN 2022 (%)	CAPKIN 2023 - 2022 (%)	TARGET RPJMD 2023	CAPKIN 2023 : RPJMD (%)
			TARGET 2023	REALISASI 2023					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	B	B	100	72,49	27,51	B	100
2	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara digital	%	62,50	100	160	186	-26,00	62,50	100
3	Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk	%	87,4	89,79	102,73	114,68	-11,95	87,4	102,73
4	Indeks Risiko Bencana	SKOR	203,0	136,83	148,24	131,66	16,58	203	148,24
5	Persentase penurunan jumlah pelanggaran Trantibum dan Perda	%	5	7	71,42	83,33	77,37	5	71,42
JUMLAH					510,97	504,83	6,14	352,90	450,97
RATA RATA CAPAIAN SASARAN					127,74	126,21	1,54	117,63	112,74

Sumber :

LKIP Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik tahun 2023

LKIP Dinas perpustakaan dan Kearsipan Daerah tahun 2023

LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023

LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2023

LKIP Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023

Hasil analisis capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Kemajuan TI** dengan 5 (Lima) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar **127,74 %** dengan kategori **Baik Sekali**.

Sasaran tersebut dicapai program dan kegiatan antara lain yaitu :

- 1) PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
 - a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
 - a. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
- 3) PROGRAM PENCATATAN SIPIL
 - a. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil
- 4) PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

- a. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan;
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - c. Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- 5) PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan.
 - 6) PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
 - a. Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Kabupaten / Kota melalui JIKN
 - 7) PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota;
 - b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Bupati/Wali Kota;
 - c. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota.

Permasalahan

Dari serangkaian program yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- 1) Keterbatasan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan administrasi kependudukan;
- 2) Terbatasnya sumber daya aparatur pelayanan;
- 3) Rendahnya kesadaran Masyarakat mengenai pentingnya dokumen administrasi kependudukan;
- 4) Kurangnya pelayanan kepada masyarakat karena terbatasnya personil anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang;
- 5) Belum optimalnya tindak lanjut dari instansi terkait, sehingga kegiatan yang sudah dilaksanakan tidak mendapatkan hasil yang maksimal;
- 6) Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat terhadap peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah daerah;
- 7) Kurangnya pagu anggaran untuk melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi dan Diklat PPNS, sehingga anggota tidak bisa mengikuti pendidikan secara keseluruhan;
- 8) Kurangnya pegawai yang mempunyai latar belakang pendidikan teknis untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- 9) Kekurangan Aplikasi Srikandi Kearsipan yang tidak ramah pada setting aplikasinya serta server yang belum sepenuhnya memadai membuat lembaga, khususnya di Pemerintah Daerah kesulitan untuk menerapkan di lingkungan kerjanya;

Solusi

- 1) Pemenuhan standar minimal kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan administrasi kependudukan seperti Printer KTP El, Laptop, Komputer, Alat Perekaman KTP El;
- 2) Penambahan personil untuk pelayanan Masyarakat;
- 3) Sosialisasi kepada Masyarakat mengenai dokumen administrasi kependudukan;
- 4) Mengaktifkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), juga peran aparat Kecamatan maupun Perangkat Desa;
- 5) Meningkatkan koordinasi antar aparat keamanan (Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja) dan instansi lain terkait penanganan konflik sehingga konflik di dalam masyarakat tidak meluas dan dapat diselesaikan;
- 6) Meningkatkan sosialisasi dan himbuan secara terus-menerus kepada masyarakat agar mengerti dan sadar hukum;
- 7) Tersedianya anggaran yang cukup untuk biaya pendidikan dan pelatihan, Bimtek, Sosialisasi dan Diklat PPNS, agar setiap personil Satpol PP mempunyai pengetahuan, wawasan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik;

- 8) Merekrut anggota polisi pamong praja dengan jumlah pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi agar rasio jumlah personil Satpol PP sesuai dengan jumlah penduduk dan luas wilayah di Kabupaten Serang agar pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan;
- 9) Diadakannya Sosialisasi serta pelatihan terkait Aplikasi Srikandi Kearsipan pada OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.

Pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan angka rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2022 mengalami **Kenaikan** yaitu sebesar **1,54 %**

MISI 6 : Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara

Sasaran 1 :

Hasil pengukuran capaian kinerja misi 6 sasaran 1 yaitu **Meningkatnya Toleransi Kehidupan Umat Beragama**, sebagai berikut:

Tabel 28 Evaluasi Kinerja Misi 6 Sasaran 1

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		CAPKIN 2023 (%)	CAPKIN 2022 (%)	CAPKIN 2023 - 2022 (%)	TARGET RPJMD 2023	CAPKIN 2023 : RPJMD (%)
			TARGET 2023	REALISASI 2023					
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Skor	87,95	80,68	87,95	87,80	0,15	87,95	80,68
2	Tingkat kejadian SARA ditengah-tengah masyarakat	Kejadian	0	0	100	100	0	0	100
JUMLAH					187,95	187,80	0,15	87,95	180,68
RATA RATA CAPAIAN SASARAN					93,98	93,90	0,075	43,98	90,34

Sumber : LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023

Hasil analisis capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Toleransi Kehidupan Umat Beragama** dengan 2 (Dua) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar **93,98%** dengan kategori **Baik**.

Sasaran tersebut dicapai program dan kegiatan antara lain yaitu :

- 1) PROGRAM WAWASAN KEBANGSAAN
 - a. Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
 - b. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
 - c. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
 - d. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

- 2) PROGRAM KETAHANAN EKONOMI SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA
 - a. Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
 - c. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
- 3) PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
- 4) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
 - c. Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
- 5) PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah;
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
 - c. Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
- 6) PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
 - a. Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
 - c. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
 - d. Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota.

Permasalahan

Dari serangkaian program yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- 1) Masih Banyaknya Kelompok Yang Harus Dibina Tentang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
- 2) Masih Banyaknya Kelompok Masyarakat Yang Harus Dibina Terkait Narkoba, Kerukunan Umat Beragama Dan Kepercayaan;
- 3) Perkumpulan (Ormas)/Yayasan banyak kendala yang belum mempunyai pengesahan badan hukum;
- 4) Masih lambatnya Pembuatan LPJ yang dibuat oleh Partai Politik;
- 5) Penyusunan dan pelaporan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan Konflik sosial di daerah belum maksimal;
- 6) kurang maksimalnya Laporan penanganan konflik dan penyusunan rencana aksi timdu penanganan konflik sosial;
- 7) Pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing di daerah kurang berjalan;
- 8) Belum Terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kecamatan karena tidak ada anggaran;
- 9) Masih kurangnya anggaran untuk kegiatan FORKOPIMDA.

Solusi

- 1) Untuk segera membuat pengesahan badan hukum agar tercatat di Badan Kesbangpol;
- 2) Untuk melakukan sosialisasi ke ASN, Pelajar, dan Masyarakat;
- 3) Untuk Melakukan Sosialisasi Dan Moderasi Dan Penanganan Tentang Narkoba;
- 4) Membuat surat himbuan kepada Partai Politik dua bulan sebelum batas waktu LPJ diserahkan kepada BPK;
- 5) Penambahan anggaran kegiatan Penyusunan dan pelaporan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan Konflik sosial di daerah;
- 6) Meningkatkan koordinasi untuk Laporan penanganan konflik dan penyusunan rencana aksi timdu penanganan konflik sosial;
- 7) Perlu sinergitas tim dan instansi terkait agar terlaksananya Pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing di daerah.

Pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan angka rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2022 mengalami **Kenaikan** yaitu sebesar **0,075 %**

BAB III

CAPAIAN KENERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Kabupaten Serang pada tahun 2023 tidak mendapatkan tugas pembantuan, oleh karena itu tidak ada yang dapat dilaporkan terkait pelaksanaan tugas pembantuan yang dimaksud



BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

1. Pendidikan Anak Usia Dini
2. Pendidikan Dasar
3. Pendidikan Kesetaraan

4.1.2. Target Pencapaian SPM Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Target Pencapaian
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	Orang	66.894
2	Program SPM Pendidikan Dasar	Orang	284.336
3	Program Pendidikan Kesetaraan	Orang	17.577

4.1.3. Realisasi

No	Jenis Pelayanan	Capaian	Hasil Capaian (Persentase)
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	61.546	92.01 %
2	Program SPM Pendidikan Dasar	284.336	100,00 %
3	Program Pendidikan Kesetaraan	16.802	95.6 %

4.1.4. Alokasi Anggaran

No	Jenis Pelayanan	Anggaran (Rupiah)
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	2,031,500,000
2	Program SPM Pendidikan Dasar	63,310,938,215
3	Program Pendidikan Kesetaraan	25,273,100,000

4.1.5. Dukungan Personil

No	Jenis Pelayanan	Dukungan Personil
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	4618
2	Program SPM Pendidikan Dasar	7165
3	Program Pendidikan Kesetaraan	7008

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

- Tidak ada permasalahan dalam Urusan Pendidikan pada tahun 2023.

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis
12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

4.2.2 Target Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Target Pencapaian
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang	35,442
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	orang	34,147
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	orang	32,521
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	orang	155,261
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	orang	202,892
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	orang	1,133,799
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	orang	120,297
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	orang	323,557
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	orang	18,811
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	orang	2,225
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	orang	30,610
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	orang	44,092

4.2.3 Realisasi

No	Jenis Pelayanan	Capaian	Hasil Capaian (Persentase)
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	33,516	95%
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	30,119	88%
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	31,274	96%
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	155,261	100%
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	202,892	100%
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1,047,693	92%
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	105,354	88%
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	251,729	78%
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	18,811	100%
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	1,815	82%
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	30,610	100%
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	37,597	85%

4.2.4 Alokasi Anggaran

No	Jenis Pelayanan	Anggaran (Rupiah)
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	240,526,000
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	260,342,600
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	31,836,000
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	19,938,000
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	33,904,000
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	521,530,000
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	57,086,000
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	108,280,000
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	31,387,500
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	190,860,000
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	27,822,000
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	27,822,000

4.2.5 Dukungan Personil

No	Jenis Pelayanan	Dukungan Personil
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2326
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2326
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	2323
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	183
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	214
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	152
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	152
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	124
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	152
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	27
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	136
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	120

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

- Tidak ada permasalahan dalam Urusan Kesehatan pada tahun 2023.

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

4.3.2 Target Pencapaian SPM Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Target Pencapaian
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	orang	6,000
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	orang	1,711,653

4.3.3 Realisasi

No	Jenis Pelayanan	Target Pencapaian	Capaian	Hasil Capaian (Persentase)
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	6,000	6,000	100 %

No	Jenis Pelayanan	Target Pencapaian	Capaian	Hasil Capaian (Persentase)
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1,711,653	1,355,804	71.84 %

4.3.4 Alokasi Anggaran

No	Jenis Pelayanan	Anggaran (Rupiah)
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	17,756,829,295
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	8,825,467,470

4.3.5 Dukungan Personil

No	Jenis Pelayanan	Dukungan Personil	Hasil Capaian (Persentase)
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	29	84,66 %
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	26	63,89 %

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

➤ Permasalahan

1. Sulit ditemukannya sumber air tanah yang layak di daerah Kecamatan Pontang, Kecamatan Tirtayasa, dan Kecamatan Tirtayasa.
2. Adanya daerah di Kabupaten Serang yang termasuk daerah NONCAT (Cekungan Air Tanah) sehingga tidak dimungkinkan dilakukan pengeboran
3. Belum adanya database Air Minum yang akurat dan detail.

✓ Solusi

1. Adanya kerja sama dngan PDAM untuk penyediaan air minum di daerah-daerah untuk pnyediaan air minum di daerah Kecamatan Pontang, Kecamatan Tirtayasa, Kecamatan Tanara serta di daerah yang kategori daerah NONCAT.
2. Dilakukan pencarian sumber-sumber air alternative misalnya mata air, Penampung Air Hujan, Waduk dan lain-lainya.
3. Adanya kegiatan pendataan akses air minum yang dilakukan secara akurat dan detail (by nama by address).

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

- a. Rencana jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- b. Jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan

4.4.2 Target Pencapaian SPM Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Target Pencapaian
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rumah	30
2	Pembangunan dan Rehabilitasi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupten/Kota	Rumah	0

4.4.3 Realisasi

No	Jenis Pelayanan	Target Pencapaian	Capaian	Hasil Capaian (Persentase)
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	30	-	0 %
2	Pembangunan dan Rehabilitasi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupten/Kota	0	-	0 %

4.4.4 Alokasi Anggaran

No	Jenis Pelayanan	Anggaran (Rupiah)	Hasil Capaian (Persentase)
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	29.246.292.372	100,00 %
2	Pembangunan dan Rehabilitasi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupten/ Kota	200.000.000	100,00 %

4.4.5 Dukungan Personil

No	Jenis Pelayanan	Dukungan Personil	Hasil Capaian (Persentase)
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	15	100,00 %

2	Pembangunan dan Rehabilitasi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupten/Kota		100,00 %
---	---	--	----------

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan
Tupoksi urusan SPM pada indikator penangan rumah layak huni atau pemberian bantuan bagi korban bencana dan ganti rugi atas program pemerintah belum satu pintu sehingga menyulitkan dalam pendataan.
- ✓ Solusi
Adanya koordinasi yang apik dalam pendataan dan perencanaan penganggaran.

4.5 Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar Pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

4.5.2 Target Pencapaian SPM Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Target Pencapaian
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Orang	436,517
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Orang	2,250
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	10,121
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Orang	354

4.5.3 Realisasi

No	Jenis Pelayanan	Capaian	Hasil Capaian (Persentase)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	100,00 %
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	2,250	0.52 %
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2,250	100,00 %
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	10,121	100,00 %
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	353	99.72 %

4.5.4 Alokasi Anggaran

No	Jenis Pelayanan	Anggaran (Rupiah)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2,708,169,832
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	-
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	182.159.156
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.283.462.814
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	3.243.533.922

4.5.5 Dukungan Personil

No	Jenis Pelayanan	Dukungan Personil	Hasil Capaian (Persentase)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	59	100,00 %
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	16	100,00 %
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		100,00 %
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	104	100,00 %
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	49	100,00 %

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

a. BPBD

- Kurangnya anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran, hal ini dikarenakan wilayah Kabupaten Serang sangat luas dan di Tahun 2022 baru ada 4 pos damkar kecamatan sedangkan jumlah kecamatan di wilayah kabupaten Serang ada 29 kecamatan dan 326 desa. Sejak pandemi covid-19 belum ada lagi pengadaan sarpras untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran sedangkan peralatan yang ada sudah banyak yang mulai rusak, termasuk pengadaan seragam PDL untuk anggota pun sudah waktunya diberikan yang baru.

✓ Solusi:

Untuk mengatasi permasalahan kekurangan sarana dan prasarana, BPBD Kabupaten Serang bekerja sama dengan instansi dan stake holder terkait untuk pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran, termasuk diantaranya dengan dunia usaha. Untuk pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran, BPBD Kabupaten Serang bekerja sama dengan relawan di kecamatan agar respons time tanggap

darurat bencana dan kebakaran dapat tercapai, dan untuk penanggulangan kebakaran BPBD Kabupaten Serang telah menjalin kerja sama dengan dunia usaha sehingga target respons time tanggap darurat kebakaran dapat tercapai.

b. Satpol PP

Kegiatan penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada terkena refocusing anggaran sehingga kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana

4.6 Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Laporan penerapan dan pencapaian SPM Urusan Sosial memuat:

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

4.6.2 Target Pencapaian SPM Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Target Pencapaian
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	orang	2
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	orang	41
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	orang	50
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	orang	10
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	orang	5326

4.6.3 Realisasi

No	Jenis Pelayanan	Target Pencapaian	Capaian	Hasil Capaian (Persentase)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	2	2	100,00 %

2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	41	41	100,00 %
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	50	50	100,00 %
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	10	10	100,00 %
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	5326	5326	100,00 %

4.6.4 Alokasi Anggaran

No	Jenis Pelayanan	Anggaran (Rupiah)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	501.245.684
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	-
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	-
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	-
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	458.809.700

4.6.5 Dukungan Personil

No	Jenis Pelayanan	Dukungan Personil	Hasil Capaian (Persentase)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	5	100,00 %
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	5	100,00 %
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	5	100,00 %
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	5	100,00 %
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	4	100,00 %

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

- Pengumpulan Data:
Belum Optimal dalam verifikasi dan validasi Data PMKS di setiap Desa diwilayah Kab Serang
- Penghitungan Kebutuhan:
Ada beberapa sub kegiatan yang memang sifatnya kasuistik yang tidak bisa ditargetkan
- Perencanaan dan Penganggaran
Anggaran belum dapat memenuhi kebutuhan Capaian SPM secara maksimal
- Pelaksanaan:
Keterbatasan SDM dan Stakeholder dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta belum optimalnya Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan penanganan PMKS.

4.7 Program dan Kegiatan

4.7.1. Urusan Pendidikan

No	Program	Kegiatan
1	PROGRAM SPM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD
		Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)
2	PROGRAM SPM PENDIDIKAN DASAR	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)
3	PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN	Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan)
		Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan)
		Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan)

No	Program	Kegiatan
		Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)
		Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)

4.7.2. Urusan Kesehatan

No	Program	Kegiatan
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM SPM PENDIDIKAN DASAR PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita
		Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif
		Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut
		Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi
		Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)
		Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)

4.7.3. Urusan Pekerjaan Umum

No	Program	Kegiatan
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

4.7.4. Urusan Perumahan Rakyat

No	Program	Kegiatan
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi

4.7.5. Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

No	Program	Kegiatan
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Investigasi Kejadian Kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

4.7.6. Urusan Sosial

No	Program	Kegiatan
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial



BAB V PENUTUP

LPPD merupakan laporan capaian yang meliputi:

1. Capaian kinerja makro
2. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan
 - a. 6 Urusan wajib pelayanan dasar
 - b. 18 Urusan wajib non pelayanan dasar
 - c. 8 Urusan pilihan
 - d. Fungsi penunjang urusan pemerintahan
3. Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah
4. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan jika ada
5. Capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Visi dan misi serta program dan kegiatan yang telah diselaraskan dengan pelaksanaan dan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah dan delapan isu strategis daerah Tahun 2023. Sebagai gambaran kenaikan dan penurunan dengan tahun 2022 keberhasilan dapat dilihat pada capaian Indikator Makro sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia mengalami kenaikan sebesar 0,889%
2. Angka Kemiskinan turun sebesar 2.218%
3. Angka Pengangguran turun sebesar 6.315%
4. Angka PDRB berdasarkan harga konstan menunjukkan bahwa ekonomi di Kabupaten Serang tumbuh sebesar 4.797%
5. Pendapatan Perkapita mengalami kenaikan sebesar 6.722%
6. Ketimpangan Pendapatan turun sebesar 3.571%

Secara umum pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Serang sebagaimana yang tertera pada BAB per BAB dalam laporan ini mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan. Untuk itu dengan segenap kerendahan hati, kami atas nama Pemerintah Kabupaten Serang memohon maaf sebesar-besarnya bila masih terdapat hal-hal yang dirasa belum sesuai dengan harapan masyarakat. Kekurangan-kekurangan yang ada merupakan bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2024, dan perencanaan Tahun 2025.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Serang, Maret 2024
Bupati Serang

Hj. RATU TATU CHASANAH, SE., M.Ak

LAMPIRAN - LAMPIRAN

